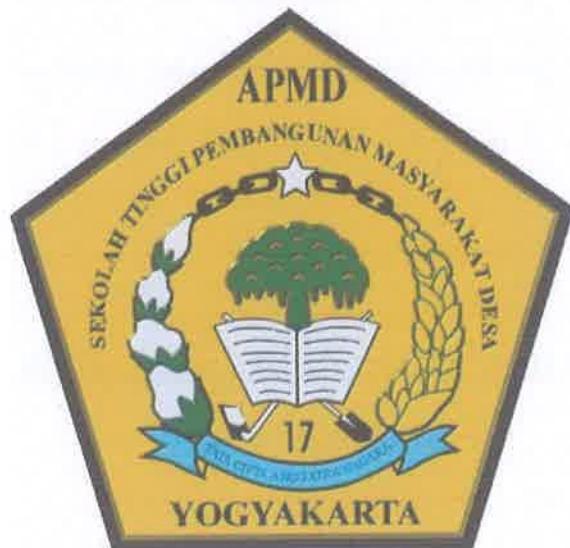


**GOVERNING PEMERINTAH DESA DALAM MELINDUNGI
PENGRAJIN DI KALURAHAN NGLIPAR, KAPANEWON NGLIPAR,
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

SKRIPSI



Disusun Oleh :

ROSWITA GABRIELA RAMBU WADA

20520060

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN (SI)

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”

YOGYAKARTA

2024



HALAMAN JUDUL

GOVERNING PEMERINTAH DESA DALAM MELINDUNGI PENGRAJIN DI KALURAHAN NGLIPAR KAPANEWON NGLIPAR KABUPATEN GUNUNGKIDUL



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA 1

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”

YOGYAKARTA

2024

HALAMAN PENGESAHAN

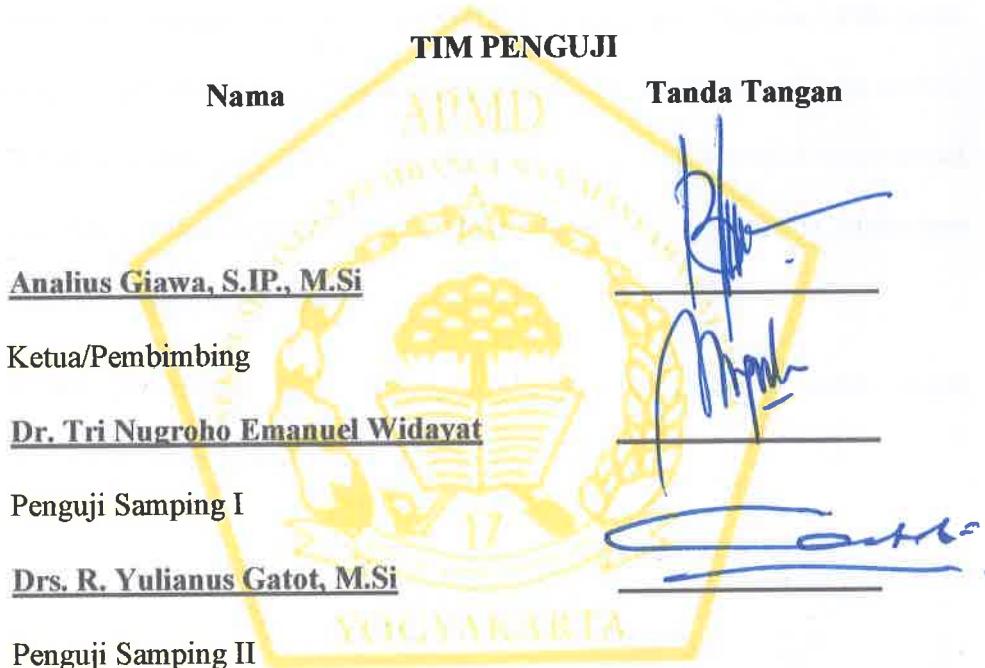
Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana (S-1) Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta:

Hari : Jumat

Tanggal : 26 Juli 2024

Jam : 12.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta



Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Roswita Gabriela Rambu Wada

NIM : 20520060

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “*Governing Pemerintah Desa dalam Melindungi Pengrajin di Kalurahan Nglipar, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunung Kidul*” adalah benar-benar merupakan hasil kerja dan karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar sesuai aslinya. Apabila di kemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 26 Juli 2024



Roswita Gabriela Rambu Wada

20520060

MOTTO

Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada
rencana-Mu yang gagal

(Ayub 42:2)

Bukan kesulitan yang membuat kita takut, tapi sering ketakutanlah yang membuat
jadi sulit. Jadi jangan mudah takut.

(Joko Widodo)

Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarkan lagi
rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang
kau inginkan. Mungkin tidak akan selalu berjalan lancar tapi gelombang-
gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan.

(Boy candra)

Ketika ada peluang untuk maju, jangan pernah untuk sia-siakan
(Roswita Gabriela)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur saya ucapkan ke hadirat Allah Bapa di Surga atas kelimpahan rahmat dan kebaikannya yang tidak terhingga berupa kesehatan, kesempatan, waktu, kemampuan dan segala kemudahan yang diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan lancar. Peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang disayangi dan dibanggakan yang diantaranya adalah:

1. Kepada Ayah saya Selvianus Kerung Pamara, terima kasih karena sudah menyayangi saya dengan cinta yang tulus dan selalu mendorong saya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini di waktu yang tepat. Segala jerih payah dan pengorbanan ayah tidak akan pernah terlupakan, dan semoga karya ini dapat menjadi salah satu wujud baktiku kepada ayah.
2. Kepada Ibu saya Lusia Leda Pote, terima kasih atas segala cinta, doa, dan dukungan yang selalu mengiringi setiap langkahku. Ibu adalah sumber kekuatan dan inspirasi yang tiada tara. Segala pengorbanan dan kasih sayangmu tidak akan pernah terlupakan, dan semoga karya ini dapat menjadi salah satu bentuk bakti dan terima kasihku kepada ibu.
3. Kepada keluarga besar Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Bung Taufik, Bung Ama, Bung Haris, Bung J, Bung Ikard, Bung Rinus, Bung Verlin, Bung Bima, Bung Julham, Bung James, Bung Markus, Bung Jekson, dan Bung Angga. Serta Sarinah yang saya cintai, Sarinah Diana, Sarinah Mumun, Sarinah Rika, Sarinah Susan, Sarinah Tika, Sarinah Lala, dan Sarinah Lisa. Terima kasih atas segala ilmu, pengalaman, dan semangat

juang yang telah diberikan selama ini. GMNI telah menjadi wadah pembelajaran dan pengembangan diri yang sangat berharga bagi saya. Semoga karya ini dapat menjadi kontribusi kecil untuk kemajuan dan kejayaan organisasi yang kita cintai.

4. Kepada pemilik NIM 20520126 yang menjadi salah satu penyemangat dalam penulisan skripsi ini, terima kasih karena sudah memberikan semangat dan dukungan serta bantuan baik itu tenaga, pikiran, materi maupun moril. Terima kasih karena sudah bersedia menjadi partner saya selama berada di masa perkuliahan. Semoga Tuhan selalu memberkati kita berdua dan sukses kedepannya.
5. Kepada teman-teman dan sahabat terbaik saya selama masa perkuliahan, yang sampai saat ini masih berada di sisi saya di antaranya Om Tri, Om Rika, Om Mega, Om Lisa, Sandi, Indra, Arin, Pira. Terima kasih karena berkat tawa dan candaan kalian semua, penulis tidak pernah merasakan kesepian sehingga harapan penulis semoga kita tetap bersama dan sukses di waktu yang akan datang.
6. Kepada keluarga kedua saya yaitu, Sarina, Aurel,Cening, Adel, Audi yang selalu hadir di setiap perjalanan saya. Terima kasih karena sudah selalu menyemangati penulis dan sudah bertahan sampai sekarang. Cinta dan pelukan hangat kalian semua akan penulis rindukan. Semoga kita selalu bersama dalam keadaan suka maupun duka.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan rahmatnya yang telah memberikan kemudahan kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Governing Pemerintah Desa dalam Melindungi Pengrajin di Kalurahan Nglipar, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul**” ini dengan baik. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S-1) Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, doa, bimbingan, dan saran yang berguna. Peneliti menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini, peneliti tidak bekerja sendiri. Oleh karena itu, dengan segenap kerendahan hati, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Gregorius Sahdan, S.I.P., M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan yang menjalankan civitas akademika STPMD “APMD” Yogyakarta.
3. Bapak Analius Giawa, S.I.P., M.Si selaku Dosen Pembimbing tercinta, yang telah mengarahkan dan memberikan banyak saran kepada peneliti dengan penuh kesabaran dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta atas ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan selama

perjalanan pendidikan di STPMD "APMD" Yogyakarta. Semua ilmu tersebut menjadi bekal berharga dalam menyelesaikan penelitian ini.

5. Pemerintah, Masyarakat dan pihak swasta di Kalurahan Nglipar yang telah memberikan dukungan penuh, baik dalam menyediakan ruang, tempat, dan waktu, maupun sebagai mitra diskusi selama penelitian ini berlangsung.

Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, apresiasi setinggi-tingginya disampaikan kepada pembaca yang telah menyempatkan waktu untuk membaca dan memberikan kritik serta saran yang bersifat membangun. Harapan peneliti, kritik dan saran tersebut dapat menjadi landasan dan panduan yang berharga bagi pengembangan penelitian di masa mendatang.

Yogyakarta, 26 Juli 2024

Penulis



Roswita Gabriela Rambu Wada

20520060

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR BAGAN	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR GRAFIK.....	xiv
<i>SUMMARY</i>	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Fokus Penelitian	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	9

1. Manfaat Akademik	9
2. Manfaat Praktis.....	9
<i>F. Literature Review</i>	9
G. Kerangkan Konseptual	13
1. <i>Governing</i>	13
2. Pemerintah desa.....	15
3. Perlindungan.....	18
H. Metode Penelitian.....	21
1. Jenis Penelitian	21
2. Unit Analisis.....	22
3. Teknik Pengumpulan Data	23
4. Teknik Analisis Data	26
BAB II PROFIL KALURAHAN NGLIPAR	29
A. Sejarah Kalurahan Nglipar	29
B. Visi dan Misi Kalurahan Nglipar	30
C. Kondisi Geografis Kalurahan Nglipar	34
D. Kondisi Demografi Kalurahan Nglipar	41
E. Keadaan Ekonomi	51
F. Sarana dan Prasarana Kalurahan Nglipar.....	59
G. Kondisi Pemerintah Kalurahan	61

H. Organisasi/Lembaga Perlindungan Masyarakat.....	64
BAB III <i>GOVERNING PEMERINTAH DESA DALAM MELINDUNGI PENGRAJIN</i>	66
A. Perlindungan Pemerintah Kalurahan terhadap Pengrajin	66
B. Dampak Perlindungan Pemerintah Kalurahan terhadap Pengrajin	77
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Informan Penelitian	23
Tabel 2. 1 Pembagian Wilayah Padukuhan, RW/RT Kalurahan Nglipar	36
Tabel 2. 2 Luas lahan Kalurahan Nglipar	37
Tabel 2. 3 Penggunaan lahan Kalurahan Nglipar	39
Tabel 2. 4 Perkembangan Populasi Ternak di Kalurahan Nglipar	57
Tabel 2. 5 Data Kondisi Jalan Tahun 2019	59
Tabel 2. 6 Data Kondisi Jembatan Tahun 2019	60
Tabel 2. 7 Daftar Padukuhan dan RT di Desa Nglipar	62

DAFTAR BAGAN

Bagan 2. 1 Sejarah Kepemimpinan Lurah Kalurahan Nglipar.....	30
Bagan 2. 2 Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan Nglipar	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Pertanian di Kalurahan Nglipar.....	53
Gambar 2. 2 Kehutanan di Kalurahan Nglipar	54
Gambar 2. 3 Perkebunan di Kalurahan Nglipar.....	55
Gambar 2. 4 Produk Kerajinan Tangan.....	70
Gambar 2. 5 cara pembuatan Kerajinan Tangan	73

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2. 1 Jumlah Penduduk dan Jumlah Kepala Keluarga Kalurahan Nglipar	43
Grafik 2. 2 Kelompok Usia Kalurahan Nglipar.....	45
Grafik 2. 3 Tingkat Pendidikan Penduduk Kalurahan Nglipar	47
Grafik 2. 4 Penduduk Menurut Mata Pencaharian Kalurahan Nglipar	49
Grafik 2. 5 Angka Kemiskinan Tahun 2019-2020	50

SUMMARY

Protection for every citizen is an obligation that must be fulfilled by a country. Likewise, the Indonesian state is obliged to protect every citizen wherever they are. Nglipar Village is a village where most of the people work as farmers. One of the jobs done by the people there is being a craftsman (handicraft). The craftsmen in Nglipar Village have started operating since 2018. This work is done as a way to fill spare time at night and some depend on this work because the income is enough to fulfill their daily needs. However, in this case, the Nglipar Village Government's protection of the craftsmen has not yet existed. Therefore, this research aims to see how the Village Government is Governing in protecting artisans in Nglipar Village, Kapanewon Nglipar, Gunungkidul Regency, Yogyakarta Special Region.

This research uses qualitative methods with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. In selecting informants, researchers chose informants who were considered actors involved in the focus of the research. The informants consisted of the village head, BUMKal chairman and members, BPKal chairman and members, and craftsmen. The research was conducted in Nglipar Village, Kapanewon Nglipar, Gunungkidul Regency, Yogyakarta Special Region. Data analysis used data reduction, data presentation and data verification.

The results of research on Governing Village Government in protecting craftsmen in Nglipar Village, Kapanewon Nglipar, Gunungkidul Regency are 1). The protection of craftsmen in Nglipar Village has not been optimal due to the limited human resources in the Village Government, which has not been able to manage the existing potential effectively. The main focus of the Nglipar administration has been on infrastructure development, such as the repair and construction of the Kalurahan road, and has neglected the development of the craft sector. 2). As a result, artisans have to rely on collectors for support and market access, leading to dependency and a lack of economic independence. The Nglipar Kalurahan government needs to increase its role in supporting local craftsmen through structured and sustainable empowerment programs so that the economic potential of crafts can be maximized and the welfare of the local community improved.

Keywords: Governing, Protection, Village Government, Craftsmen

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Negara Republik Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah, akan mengingat hak-hak asal-usul daerah tersebut. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa yang memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan dilaksanakan kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam kehidupan bernegara, pemerintahan sangat dibutuhkan untuk mengatur rakyat, mengayomi rakyat, serta memenuhi

kebutuhan rakyat karena sifat hakikat negara memiliki sifat memaksa, monopoli, dan mencakup keduanya. Dengan adanya pemerintahan, semua wilayah dan batas-batasnya dapat dikontrol dan diawasi serta dapat diatur dengan mudah. Setiap wilayah memiliki pemerintahan dan perangkat pemerintahannya sendiri mulai dari desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat.

Hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa memiliki legitimasi dari negara untuk mengatur dan mengurus sumber daya alam yang ada di desanya. Pada konteks ini, pemerintah memiliki peluang yang besar untuk mengelola potensi sumber daya alam. Oleh karena itu, Pemerintah desa berperan dalam penyelenggara pemerintah desa, selain itu juga, pemerintah desa juga dituntut untuk melakukan Pembangunan, Pembinaan, dan pemberdayaan kepada masyarakat, agar potensi yang ada di desa dapat memberikan *Output* yang berdampak besar pada kemajuan desa dan kesejahteraan Masyarakat desa. Dengan hadirnya UU tersebut Pemerintah desa memiliki peran dan tanggung jawab yang besar untuk mencapai hal tersebut. Oleh karena itu, pemerintah desa harus mampu menerapkan prinsip akuntabilitas dan efektivitas dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan. Selain itu desa memiliki landasan yang kuat dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang efektif, agar dapat mempercepat setiap pembangunan di desa dan mampu menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Implementasi semangat UU Nomor 6 Tahun 2014, masih banyak mengalami berbagai hambatan, sehingga masih jauh dari harapan. Dari beberapa permasalahan implementasi undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa tersebut masih terlihat jelas peran dominan pemerintah. Sedangkan peran masyarakat masih dipandang sebagai pihak yang lemah untuk dilibatkan. Kondisi ini bertolak belakang dengan spirit Undang-undang desa yang memberi peluang kepada pemerintah desa dan masyarakat desa untuk mandiri. Pengelolaan Sumber daya Alam harus diinsiasi langsung oleh pemerintah desa, semua lapisan Masyarakat kalangan bawah ataupun kalangan atas, maupun swasta. Semua unsur diatas diharapkan saling bersinergi dalam merespon dan mengatasi masalah yang ada di Kalurahan Nglipar.

Kalurahan Nglipar merupakan salah satu kalurahan yang terletak di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalurahan Nglipar memiliki berbagai potensi sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan untuk perekonomian diantaranya pelepas pisang. Masyarakat di Kalurahan Nglipar merupakan masyarakat yang mayoritasnya bekerja sebagai petani, buruh tani dan buruh harian lepas, meskipun banyak upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan pendapatan keluarga melalui rintisan-rintisan industri rumah tangga, akan tetapi selalu terkendala dengan permodalan dan pemasaran hasil produksinya. Masyarakat kalurahan Nglipar juga memiliki keterampilan , salah satunya kerajinan tangan untuk membuat anyaman dari pelepas pisang. Dengan adanya keterampilan ini

pihak swasta melihat ada sebuah peluang di Kalurahan Nglipar dengan memberikan modal kepada masyarakat untuk membuat anyaman yang mereka inginkan dan memberikan upah yang terbilang rendah tidak sesuai dengan tenaga yang mereka keluarkan. Seharusnya Pemerintah Kalurahan mampu hadir untuk mengidentifikasi setiap potensi yang ada, agar hal ini dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat dalam membangun ekonomi kreatif di Kalurahan Nglipar.

Kalurahan Nglipar terdapat salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri kerajinan tangan (*hand craft*) yang telah lama beroperasi. Adanya perusahaan ini di Kalurahan Nglipar bisa membantu masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan sampingan selain bertani. Perusahaan ini memberikan modal ke masyarakat untuk memproduksi satu kerajinan tangan. Perusahaan ini memanfaatkan keterampilan masyarakat untuk memproduksi kerajinan tangan yang di produksi secara manual. Dalam memproduksi satu buah kerajinan tangan tersebut, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaiannya sangat variatif tergantung jenis dan ukuran barang tersebut, diantaranya ada yang membutuhkan waktu kurang lebih satu hari dan ada juga yang membutuhkan waktu setengah hari. Perusahaan *hand craft* memberikan biaya produksi persatu kerajinan tangan berkisar Rp. 4.000 sampai Rp. 6.000. Dari hasil observasi, masyarakat merasa bahwa keuntungan yang di dapatkan kurang memuaskan karena tenaga dan waktu yang mereka habiskan tidak seimbang dengan yang mereka dapatkan.

Pengelolaan Sumber Daya Alam harus diinsiasikan langsung oleh Pemerintah Kalurahan, semua lapisan masyarakat kalangan bawah ataupun kalangan atas, maupun swasta. Semua unsur diatas diharapkan saling bersinergi dalam merespon dan mengatasi masalah kemiskinan di Kalurahan Nglipar. Pemerintah harus memiliki kemampuan *networking* yang dapat dipahami bahwasannya pemerintah Kalurahan dan warga Kalurahan dalam membangun komunikasi dengan pihak luar (pihak swasta) untuk mendukung pemerintah dalam menyelesaikan masalah yang ada.

Akan tetapi, ada dampak positif dan negatif dari adanya perusahaan kerajinan tangan ini yaitu dampak positifnya masyarakat memiliki pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan masyarakat mendapatkan pengetahuan baru bahwa pelepas pisang bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan biaya tambahan serta kehadiran perusahaan kerajinan tangan dapat mendorong pengembangan keterampilan dan kreatifitas masyarakat Kalurahan, melalui pelatihan dan kerja sama dengan pengrajin yang lebih berpengalaman, penduduk Kalurahan dapat meningkatkan keterampilan mereka dalam membuat berbagai produk kerajinan. Dampak negatifnya yaitu eksloitasi tenaga kerja dimana pihak swasta dapat memanfaatkan keterampilan masyarakat dengan memberikan upah rendah atau kondisi kerja yang buruk serta kehilangan kontrol lokal yang dimana keterlibatan pihak swasta dapat mengakibatkan kehilangan kontrol sumber daya lokal dan produksi oleh masyarakat yang pada gilirannya dapat mengancam keberlanjutan ekonomi dan lingkungan.

Penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis *Governing* pemerintah desa dalam melindungi pengrajin di kalurahan Nglipar, kapanewon Nglipar, kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalurahan Nglipar memiliki potensi perputaran ekonomi masyarakat luas dengan didukung adanya Pasar Negeri, jalur transportasi antar Kapanewon, banyaknya pelaku bisnis jasa dan pedagang kecil lokal dari luar wilayah Kalurahan Nglipar serta keberadaan Badan Usaha Milik Kalurahan yang telah memiliki beberapa embrio penopang ekonomi rakyat. Kalurahan Nglipar terletak di 11 Km sebelah utara dari pusat Pemerintahan Kabupaten Gunungkidul dengan ketinggian + 200 km di atas permukaan laut.

Dari pernyataan diatas dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh Donna Savira Larasati (2018), Vol 4, No 3, dalam Jurnal Hubungan Internasional dengan judul "Peran Pemerintah Indonesia dalam Melindungi Hak TKI dari Praktik *Underpayment* di Hongkong" mengemukakan dalam hasil penelitiannya bahwa Pemerintah Indonesia mengupayakan perlindungan TKI dalam menangani TKI yang mengalami praktik *underpayment* dalam bentuk kebijakan. Kebijakan yang dimaksud dalam melindungi hak TKI dari praktik *underpayment* yang adalah sebagai berikut, Indonesia menetapkan undang – undang ketenagakerjaan yang mengatur hak-hak yang harus didapat TKI dalam UU No. 39 tahun 2003 serta biaya penempatan TKI ke Hongkong dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja 98 tahun 2012, meratifikasi konvenan internasional seperti *The International Convention on The Protection of The Rights of All*

Migrant Workers and Members of Their Families (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya) yang dikeluarkan oleh PBB pada tahun 2012 lalu dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012, KJRI Hongkong sebagai perwakilan Pemerintah Indonesia di Hongkong memberikan pelatihan kepada TKI untuk menunjang kinerja TKI yang baik sehingga majikan pun juga memperlakukan TKI dengan baik, mem-*blacklist* majikan dan agensi yang terbukti melakukan kecurangan dengan tidak memberikan hak upah TKI yang layak sesuai perjanjian kerja serta melakukan koordinasi dengan pemerintah dalam negeri yaitu Kementerian Luar Negeri dan BNP2TKI untuk mengusut kasus *underpayment*, kemudian Pemerintah Indonesia mencanangkan aturan pembayaran biaya penempatan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) lewat bank nasional untuk menghindari *overcharging* yang merupakan faktor penyebab utama terjadinya praktik *underpayment*, Pemerintah Indonesia melakukan koordinasi dengan Departemen Tenaga Kerja Hongkong serta melakukan MoU perlindungan tenaga kerja dengan Hongkong pada 1 Mei 2017, serta Pemerintah Indonesia juga menggandeng jaringan buruh migran Indonesia di Hongkong untuk mengawal permasalahan TKI di Hongkong.

Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya praktik *Underpayment* di Hongkong dapat merugikan Tenaga Kerja Indonesia dan mengancam Hak perjanjian kerja yang telah ditetapkan. Hal

ini juga akan berdampak kepada masyarakat yang akan bekerja di Hongkong pada waktu yang akan datang.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti akan meneliti lebih lanjut tentang Dalam penelitian ini, peneliti akan mengungkap *Governing* pemerintah desa dalam melindungi pengrajin di Kalurahan Nglipar, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menggunakan perspektif *Governing*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana *Governing* pemerintah desa dalam melindungi pengrajin?”

C. Fokus Penelitian

Menurut Moleong (2014:97) fokus penelitian merupakan inti yang didapatkan dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperoleh dari studi kepustakaan ilmiah. Penelitian ini berfokus pada *governing* pemerintah desa dalam melindungi pengrajin. Oleh karena itu, penulis berfokus pada :

1. Perlindungan Pemerintah Kalurahan terhadap Pengrajin
2. Dampak Perlindungan Pemerintah Kalurahan terhadap Pengrajin

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi isu-isu atau fenomena yang berkaitan dengan perlindungan pengrajin dalam kegiatan kerajinan tangan di Kalurahan Nglipar

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Akademik

Secara umum, manfaat dari penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pengetahuan bagi pembaca yaitu sebagai bahan literasi, bahan kajian serta sumber-sumber kebaharuan dari penelitian sebelumnya khususnya tentang governing pemerintah desa dalam melindungi warga di Kalurahan Nglipar

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dan masyarakat Kalurahan Nglipar.

F. Literature Review

1. Penelitian berikutnya dari Alfian Horukie (2015) dalam jurnal ilmu politik volume 2 nomor 6 yang berjudul "*Peranan Pemerintah Desa Memberi Perlindungan Hak Milik Atas Tanah Masyarakat di Desa Ponto Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara*". Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Desa Wori dalam memberikan perlindungan hak milik atas tanah masyarakat yaitu dengan menjalankan peran sebagai fasilitator, pendampingan dan mengeluarkan surat keterangan atas proses lanjut untuk membuat akta tanah atau sertifikat.
2. Penelitian dari Muhammad Sood, Lalu Putrawandi, dan Khairur Rizki (2021) dalam jurnal Wartal Desa volume 3 nomor 2 dengan judul "*Upaya Pencegahan Peredaran Narkoba Dalam Rangka Melindungi Masyarakat*

Di Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat". Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa lemahnya peran kelembagaan, seperti kurangnya pembinaan dan sosialisasi dari pemerintah dan tokoh masyarakat tentang bahaya penggunaan narkoba, dan lemahnya penegakan hukum. Berbagai upaya dapat dilakukan untuk mencegah masuk dan beredarnya narkotika dan obat-obatan terlarang di Kabupaten Lombok Tengah, baik melalui upaya preventif seperti sosialisasi, pembinaan dan pengawasan, maupun penjatuhan tindakan represif, seperti penerapan sanksi pidana bagi pengedar dan pemakai narkoba agar menimbulkan efek jera.

3. Penelitian dari Setia Putra (2014) dalam jurnal ilmu hukum volume 4 nomor 2 dengan judul "*Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi jual-beli melalui e-Commerce*". Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan e-Commerce dalam UU ITE telah memberikan kepastian dan kesepahaman mengenai apa yang dimaksud dengan perdagangan melalui sistem elektronik dan memberikan perlindungan dan kepastian kepada pedagang, penyelenggara dan konsumen dalam melakukan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik. Perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual beli melalui media internet meliputi perlindungan hukum dalam perjanjian yaitu perlindungan hukum yang dibuat oleh merchant dalam bentuk aturan yang telah disepakati kedua belah pihak dan perlindungan hukum yang berasal dari UU ITE Pasal 25 yang mengatur tentang privacy berupa data pribadi merchant dan customer.

4. Penelitian dari Rini Fitriani (2016) dalam jurnal Hukum Volume 11, nomor 2 dengan judul “*Peranan Penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi hak-hak Anak*”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh. Akan tetapi pada kenyataannya kondisi anak-anak di Indonesia masih sangat memprihatinkan terutama yang menyangkut masalah pekerja anak, anak jalanan, dan anak-anak korban kekerasan seksual, eksloitasi seksual, dan eksloitasi seksual komersial. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pelanggaran terhadap perlindungan hak-hak anak, selain merupakan pelanggaran hak-hak asasi manusia juga penghalang yang sangat besar bagi kelangsungan hidup dan perkembangan anak.
5. Penelitian dari Fina Aura Regita dan Ananta Prathama (2023) dalam jurnal Ilmu Administrasi Volume 12, nomor 1 dengan judul “*Peran Pemerintahan Desa Dalam Upaya Pencegahan dan Penurunan Stunting terintegrasi*”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintahan Desa Wedoro dalam melakukan intervensi gizi spesifik dengan membuat program pos gizi,sosialisasi melalui program Kelas Ibu Hamil dan memberikan imunisasi untuk pengobatan infeksi atau penyakit. Namun, dikarenakan fasilitas kesehatan yang terbatas, apabila terjadi penyakit stunting serius, kader kesehatan hanya memberikan rekomendasi kepada puskesmas maupun tenaga kesehatan yang lebih profesional. Sedangkan peran dalam

intervensi gizi sensitif,yakni melalui penyaluran bantuan sembako, pemantauan bulanan melalui posyandu dengan ditunjang KMS, pendampingan stunting melalui Kader PENTING. Namun pada konsultasi gizi online melalui Ayo C-Ting belum efektif. Kemudian, dalam penyediaan air bersih dan sanitasi ditemukan masih ada masyarakat yang belum menggunakan akses air bersih yang tidak memadai.

Penelitian terdahulu lebih fokus pada isu perlindungan hak-hak anak Indonesia, seperti perlindungan anak, dan intervensi dalam upaya pencegahan stunting. Sementara itu, penelitian saat ini lebih menekankan pada peran pemerintah desa dalam melindungi warga dan mengelola potensi sumber daya alam di tingkat lokal, khususnya dalam konteks Kalurahan Nglipar. Penelitian terdahulu mungkin menggunakan pendekatan yang lebih khusus, seperti analisis kebijakan, survei, atau studi kasus. Sementara itu, penelitian saat ini dapat melibatkan pendekatan yang lebih holistik, termasuk analisis tata kelola pemerintahan Kalurahan dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Penelitian terdahulu mungkin lebih fokus pada keterlibatan pemerintah, organisasi non-pemerintah, atau lembaga internasional dalam menangani isu-isu tertentu. Di sisi lain, penelitian saat ini lebih menyoroti interaksi antara pemerintah Kalurahan, masyarakat lokal, dan sektor swasta dalam konteks pengelolaan sumber daya dan pembangunan ekonomi lokal.

Dengan demikian, meskipun terdapat kesinambungan dalam pemahaman terhadap perlindungan dan kesejahteraan masyarakat,

penelitian saat ini menitik beratkan pada konteks dan tantangan yang spesifik di tingkat lokal, terutama dalam konteks pemerintahan Kalurahan dan pengelolaan sumber daya alam.

G. Kerangka Konseptual

1. *Governing*

Governing Perbuatan pemerintah disebut *governing* (G2). *Governing* adalah sebuah konsep yang perlu dibedakan dengan konsep ruling, walaupun banyak ahli yang sering menyamakannya. Literatur pembeda ditulis oleh Steven A. Cook (2007) "*ruling but not governing*" (menguasai tetapi tidak memerintah). Literatur tersebut membahas tentang bagaimana dominasi militer dalam politik, atau bisa dikatakan bahwa kekuasaan dapat mengontrol seluruh lini atau ruang, tetapi tidak dapat memerintah (*governing*). Dalam hal ini ruling juga bisa dipahami sebagai kondisi yang tidak menjadi pemerintah, dalam artian tidak mengatur atau mengurus. Ada juga beberapa literatur yang menganggap antara ruling dengan governing berbeda, di mana ruling sendiri bisa dilakukan. Konsep governing yang dipahami sebagai upaya untuk mengatur dan mengurus harus memiliki proses, fungsi dan hasil. *Governing* mengandung proses politik, hukum, dan administrasi. Pembentukan hukum dan kebijakan adalah perbuatan penting pemerintah dalam governing. Gagasan ideal dalam konteks ini adalah fungsi ekstraksi, distribusi, proteksi, dan koreksi yang dijalankan oleh pemerintah atas negara, warga dan masyarakat.

Governing mengandung sebuah proses politik, hukum, dan administrasi. Sebab politik merupakan sebuah kegiatan dan keputusan hukum, sedangkan adminitrasi merupakan bentuk teknis eksekusi dari hukum atau keputusan. *Governing* berarti mengatur dan mengurus ekonomi, sosial, politik, dan lain-lain yang dilakukan pemerintah. Fungsi pemerintah utamanya sebagai *protecting* atau melindungi bukan sekedar promoting. *Protecting* yang memiliki arti pemerintah harus bisa melindungi rakyatnya dari rampasan elite ekonomi dan menyelesaikan sengketa. *Governing* mengacu pada keputusan yang dibuat pemerintah dalam upaya mengatur serta mengurus kepentingan masyarakatnya setempat. *Governing* merupakan sebuah kontestasi agar tetap lurus diperlukan pemerintah yang kuat, berdaulat dan demokratis serta tidak diintervensi oleh elite, dan pihak lainnya. Kalurahan sebagai kesatuan masyarakat hukum atau badan hukum publik memiliki kewenangan meskipun belum seluas kewenangan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan yaitu *governing* adalah perbuatan atau aktivitas memerintah oleh pemerintah yang mempunyai otoritas dan menjadi sebuah legitimasi untuk menyelenggarakan pemerintahan. Dalam pengertian dasar memerintah adalah penggunaan otoritas politik yang dipegang oleh pemerintah. Dalam melakukan aktifitasnya untuk mewujudkan tujuan mensejahterakan rakyat, pemerintah melakukan dua macam tindakan atau perbuatan yaitu tindakan biasa atau nyata (*feitelijkehandelingen*) dan tindakan hukum

(*rechtshandelingen*). Tindakan nyata adalah tindakan/perbuatan pemerintah yang tidak ada relevansinya dengan hukum dan oleh karenanya tidak menimbulkan akibat-akibat hukum, sedangkan tindakan hukum yang berdasarkan sifatnya dapat menimbulkan akibat hukum tertentu atau dapat menciptakan hak dan kewajiban.

Konsep *Governing* sangat tepat untuk melihat pengaplikasian kebijakan yang dilaksanakan pemerintahan Kalurahan Nglipar dalam upaya melindungi warga karena rumusan *Governing* mengacu pada keputusan yang dibuat oleh pemerintah Kalurahan Nglipar kepada masyarakat untuk terus melindungi warga dalam permasalahan yang ada.

2. Pemerintah desa

Pemerintahan Desa secara garis besar merupakan pemerintahan yang berlangsung di Desa dan dilakukan oleh Pemerintah Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa. Pemerintah desa dalam hal ini adalah kepala desa dibantu oleh perangkat Desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Pemerintah Desa merupakan sebuah lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa juga merupakan organisasi pemerintahan yang mempunyai peran besar dalam menjalankan tugasnya. Kemudian UU No. 6/2014 tentang Desa disebutkan bahwa Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa berdasarkan asas: a) kepastian hukum; b) tertib penyelenggaraan pemerintahan; c) tertib kepentingan umum; d) keterbukaan; e)

proporsionalitas; f) profesionalitas; g) akuntabilitas; h) efektivitas dan efisiensi; i) kearifan lokal; j) keberagaman; dan k) partisipatif.

Pemerintah Desa sebagai penyelenggara Pemerintahan dilaksanakan oleh Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa. Dalam kehidupan bernegara, pemerintah sangat dibutuhkan untuk mengatur rakyat, mengayomi rakyat serta memenuhi kebutuhan rakyat karena bersifat hakekat. Negara memiliki sifat memaksa, monopoli dan mencakup keduanya. Dengan adanya pemerintahan semua wilayah dan batas-batasnya dapat di kontrol dan diawasi serta dapat diatur dengan mudah (Sugiman, 2018:82).

Sutoro Eko (2015: 46) menerangkan bahwa, Desa merupakan organisasi pemerintahan paling kecil, paling bawah, paling depan dan paling dekat dengan masyarakat. paling "kecil" berarti bahwa wilayah maupun tugas-tugas pemerintahan kabupaten/kota, provinsi maupun pusat, Paling "bawah" berarti Desa menempati susunan atau lapisan pemerintahan yang terbawah dalam tota pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Namun "bawah" bukan berarti desa merupakan bawahan kabupaten/kota, atau kepala Desa bukan bawahan Bupati/Walikota. Desa tidak berkedudukan sebagai pemerintahan Kabupaten/Kota sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 200 UU No. 32/2004. "bawah" juga berarti bahwa Desa merupakan organisasi pemerintahan yang berhubungan secara langsung dan menyatu dengan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat sehari-hari. Istilah "bawah" juga mempunyai kesamaan dengan

istilah "depan" dan "dekat". Istilah "depan" berarti bahwa Desa berhubungan langsung dengan warga masyarakat baik dalam bidang pemerintahan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan maupun kemasyarakatan. Sebagian besar warga masyarakat Indonesia selalu datang kepada Pemerintah Desa setiap akan memperoleh pelayanan maupun menyelesaikan berbagai masalah sosial. Sedangkan istilah "dekat" berarti bahwa secara administratif dan geografis, Pemerintah Desa dan warga masyarakat mudah untuk saling menjangkau dan berhubungan. Secara sosial, "dekat" berarti bahwa Desa menyatu dengan denyut kehidupan sosial budaya sehari-hari masyarakat.

Konsep pemerintahan di atas menegaskan bahwa Pemerintah Desa merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang dipimpin oleh Kepala Desa dan dibantu oleh perangkat Desa sebagai kelompok orang yang bekerja didalam suatu pemerintahan. Selain itu Pemerintah Desa juga sangat dekat dengan masyarakat sehingga segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat maka Pemerintah Desa yang depan dan paling dekat melayani dan mengatasi aspek-aspek tersebut.

Pemerintah Desa sebagai pihak yang diberikan kewenangan dalam penyelenggaraan pembangunan tingkat Desa tidak hanya mampu mensinergikan berbagai kebijakan pembangunan dengan pengembangan wisata yang ada, tetapi juga harus mampu mengakomodasi pengembangan Desa wisata tersebut sebagai sarana untuk meningkatkan perekonomian

masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan Desa (Dian Herdiana, 2019:71).

3. Perlindungan

Perlindungan bagi setiap warga negara merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu negara. Begitu juga negara Indonesia yang wajib melindungi setiap warga negaranya dimanapun berada. Hal ini sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) Alinea ke 4 (empat) yang berbunyi “*Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Memajukan kesejahteraan umum. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial*”. Lebih lanjut perlindungan negara terhadap warga negaranya berlaku dimanapun dia berada di seluruh penjuru dunia karena perlindungan yang diberikan merupakan salah satu hak warga negara yang diejewantahkan dalam Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Oleh karena itu dengan adanya perlindungan WNI di manapun dia berada, negara bukan hanya memenuhi kewajibannya namun juga telah memenuhi hak asasi manusia warga negara tersebut. Pada dasarnya seseorang yang berada di dalam wilayah suatu negara secara otomatis harus tunduk pada ketentuan-ketentuan yang berlaku

di dalam wilayah negara tersebut. Namun, meskipun warga negara asing harus tunduk pada ketentuan yang berlaku pada negara yang di tempati.

Melindungi merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara untuk bertindak aktif untuk memberi perlindungan terhadap warganya. Dalam hal ini, negara harus turut campur untuk mengatur agar setiap hak warga negaranya itu bisa terlindungi. Secara terminologi, perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni “perlindungan” dan “hukum”. KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Lalu, hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Merujuk definisi tersebut, perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Singkatnya, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri; memberikan perlindungan.

Beranjak dari definisi sederhana tersebut, Kamus Hukum mengartikan perlindungan hukum sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat. Peraturan ini dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib dan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut akan menyebabkan pengambilan tindakan.

Satjipto Rahardjo (2006:53) mengartikan perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka

kepentingannya tersebut. Adapun yang dimaksud dengan kekuasaan adalah hak, yaitu kekuasaan yang hanya diberikan oleh hukum kepada seseorang.

Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum yang memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik atas gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Adapun, bentuk perlindungan hukum antara lain perlindungan hukum perdata, perlindungan hukum konsumen, pelindungan data pribadi, dan lain sebagainya. Contoh perlindungan hukum perdata dapat ditemukan dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Selanjutnya, perlindungan konsumen diatur dalam UU Perlindungan Konsumen. Arti perlindungan konsumen sebagaimana termaktub di Pasal 1 Angka 1 UU Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Lalu, yang dimaksud dengan pelindungan data pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi.

Dari penjelasan diatas peneliti menyimpulkan bahwa perlindungan melibatkan perasaan aman dan nyaman dalam situasi atau lingkungan tertentu. Ini bisa mencakup perlindungan fisik dari bahaya, seperti keamanan pribadi dan kesehatan, serta perlindungan emosional dari stres, kecemasan, atau tekanan. Selain itu, perlindungan juga bisa berarti memiliki dukungan sosial dan jaringan yang kuat, serta akses ke sumber daya yang

membantu dalam mengatasi tantangan atau krisis. Secara keseluruhan, perlindungan bagi peneliti adalah tentang memiliki rasa keamanan dan dukungan yang memungkinkan untuk berkembang dan meraih potensi penuh dalam kehidupan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan eksplanasi. Secara etimologi, eksplanasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *explanation* yang artinya penjelasan. Sementara secara spesifik, teks eksplanasi adalah teks yang berisi uraian tentang berbagai fenomena seperti budaya, alam dan lainnya. Eksplanasi bertujuan agar dapat menjelaskan fenomena yang terjadi dan menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa sehingga eksplanasi berisi tentang proses "mengapa" dan juga "bagaimana" akan berbagai kejadian yang terjadi, baik itu kejadian alam, ilmu pengetahuan, budaya sosial dan sebagainya.

Selanjutnya Bogdan dan Taylor (2012:22) menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Bisa dikatakan bahwa pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara menyeluruh (*holistic*). Ini berarti bahwa individu tidak boleh di isolasi atau di organisasikan ke variabel atau hipotesis, namun perlu di pandang sebagai suatu keutuhan. Selain itu, metode penelitian deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk

meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

Sehingga deskriptif kualitatif berusaha untuk melakukan penelitian dan menyajikan data, serta menggambarkan atau melukiskan fakta-fakta yang diperoleh. Maka selanjutnya adalah tafsiran, dianalisis dan disimpulkan berdasarkan dengan fakta-fakta yang ada.

2. Unit Analisis

a) Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah orang yang dijadikan informan sebagai sumber data atas sumber informasi oleh peneliti. menurut Arikunto (2006:145) subyek penelitian adalah subyek penelitian yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Jika bicara tentang subyek penelitian, sebetulnya kita bicara tentang unit analisis, yaitu subyek yang menjadi pusat perhatian atau sasaran penelitian. Dalam penelitian ini, responden adalah orang yang diminta kesediaannya untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat.

Maka dari itu, subyek penelitian adalah seluruh komponen yang terdapat dalam *governing* Pemerintah desa dalam melindungi pengrajin yaitu Pemerintah Kalurahan dan pengarajin yang ada di kalurahan Nglipar, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul. Maka komponen yang dimaksud adalah terdiri dari:

Tabel 1. 1 Informan Penelitian

No	Nama	J.K	Usia (tahun)	Keterangan	Pekerjaan
1	Samsuri S.Pd	L	64	Lurah Nglipar	PNS
2	Agung Murdianto	L	43	Carik	Petani
3	Wasto	L	64	Ketua BPKal	Peternak
4	Marsudi S.Sos	L	56	Angota BPKal	PNS
5	Sukiyo	L	64	Anggota BUMKal	Petani
6	Suardi M.Pd	L	56	Ketua BUMKal	PNS
7	Siti Fatimah	P	43	Masyarakat (pengrajin)	Petani
8	Ngatini	P	57	Masyarakat (pengrajin)	Petani
9	Nuning	P	44	Masyarakat (pengrajin)	Petani
10	Muryani	P	48	Masyarakat (pengrajin)	Petani
11	Suyatin	L	48	Masyarakat (pengepul)	Petani

Sumber data : peneliti tahun 2024

b) Obyek Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian, yang menjadi obyek penelitian adalah *governing* pemerintah desa dalam melindungi pengrajin di Kalurahan Nglipar, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul.

3. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Bungin (2007:110) metode pengumpulan data kualitatif yang paling independen adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam setiap penelitian diperlukan kemampuan memilih dan menyusun teknik dan alat pengumpul data yang relevan. Kecermatan dalam memilih dan menyusun teknik dan alat pengumpul data ini sangat berpengaruh pada hasil penelitian. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan sebagai analisis dan pembahasan, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara dan

dokumentasi, Berikut ini dijelaskan secara ringkas kerja pengumpulan data dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

1) Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan (Bungin, 2007:115). Dengan metode observasi ini, maka peneliti akan menggunakan metode ini pada saat berada di lokasi penelitian, kemudian melakukan observasi dengan cara mengamati dan mencatat kegiatan yang dilakukan oleh pengrajin dalam pembuatan bentuk kerajinan tangan yang diinginkan oleh pengepul.

Kemudian Satori dan Komarish (2012:105) menjelaskan bahwa observasi adalah melakukan pengamatan langsung obyek guna mengetahui tentang situasi, keberadaan obyek, konteks dan makna pada saat pengumpulan data. Dalam penelitian adapun adapun obyek-obyek observasi yang ditemukan oleh peneliti selama di lapangan yaitu alat-alat atau bahan yang digunakan pengrajin, cara pembuatan kerajinan dan produk hasil kerajinan para pengrajin.

2) Wawancara

Wawancara merupakan suatu percakapan yang dilaksanakan oleh dua orang atau lebih dengan maksud tertentu terdiri dari pihak pewawancara dan terwawancara, Pihak pewawancara (*interviewer*) adalah seseorang yang memberikan pertanyaan dan pihak terwawancara (*interviewee*) adalah

seseorang yang menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut (Moleong, 2014:186).

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data atau pencarian data dengan melakukan tanya jawab lisan (*face to face*) dengan siapa saja yang diperlukan atau dikehendaki dalam wawancara, interaksi dan komunikasi sangatlah penting dalam proses penelitian karena pengumpulan informasi yang dilakukan adalah mendatangi langsung informan untuk di mintai keterangan mengenai sesuatu yang diketahuinya.

Mengenai kejadian, fakta maupun pendapat informan. Selain itu, peneliti menggunakan pedoman wawancara yang disusun sesuai dengan ruang lingkup penelitian dalam melakukan wawancara bersama informan. Wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada bagian- bagian yang terlibat dalam penelitian ini.

3) Dokumentasi

Menurut Moleong (2014:1600) mengemukakan bahwa analisis dokumentasi dapat digunakan karena merupakan sumber yang stabil, kaya dan mendorong serta dokumentasi sifatnya alamiah sesuai dengan kontek lahiriah tersebut. Kemudian Satori dan Komarinh (2010:149) bahwa dokumentasi yaitu mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.

Dalam penelitian ini, peneliti mendapat dokumentasi sebagai bahan penguatan data yaitu dokumen transaksi penjualan (jual beli) antara pengepul

dan pengrajin, dokumentasi peralatan, dokumentasi aktivitas pengrajin saat membuat kerajinan, dokumentasi bahan material, RPJMKA, data tabel serta sumber lain yang berkaitan dengan aspek-aspek yang berupa catatan maupun peta yang diharapkan dapat memberikan gambaran tentang keadaan tempat penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Metode analisis data merupakan kelanjutan dari pengolahan data. Membahas hasil analisis data yaitu berpikir tentang kaitan antara data dan mungkin dengan latar belakang yang menyebabkan adanya persamaan atau perbedaan yang kemudian menghasilkan kesimpulan. Analisis data bertujuan dalam membuat penyelesaian dan memberi jawaban-jawaban dari setiap rumusan masalah yang sudah dibuat, serta memberikan kesimpulan dan saran untuk penelitian selanjutnya.

Setelah peneliti menentukan fokus penelitian, maka tahap selanjutnya adalah analisis selama di lapangan (pekerjaan lapangan), analisis selama di lapangan ini, menggunakan model analisis data kualitatif versi Miles dan Huberman dalam (Usman dkk, 2009:85). Selanjutnya Miles dan Huberman (1992:15) dalam Moleong (2014) menyatakan dalam analisis kualitatif dapat dilaksanakan dengan cara terus menerus (interaktif) sampai tuntas sampai menjadi data jenuh. Teknik dalam melaksanakan analisis data, yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan mencari tema dan polanya, memilah hal-hal yang dirasa penting, merangkum, serta membuang hal-hal yang dirasa tidak diperlukan. Reduksi data nantinya akan menghasilkan gambaran dan langkah yang jelas dalam melaksanakan pengumpulan data selanjutnya. Kemudian data yang diperoleh peneliti dari lapangan seperti observasi, wawancara dan dokumentasi dicatat secara teliti, rinci, dan sistematis. Setiap kali terjun ke lapangan tentunya data yang terkumpul semakin banyak. Data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran yang tajam tentang hasil observasi dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data dan mencarinya bila sewaktu-waktu diperlukan.

2. Penyajian Data

Dalam penyajian data bisa bentuk tulisan atau kata-kata, gambar, grafik, dan tabel. Tujuan dari penyajian data ialah untuk menggabung informasi sehingga bisa menggambarkan keadaan yang terjadi. Setelah data direduksi. langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data-data hasil penting reduksi data kemudian disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Penyajian data juga dapat berbentuk matriks, grafik dan bagan. Dengan penyajian data ini. peneliti mudah untuk memahami apa yang terjadi dan dapat direncanakan kerja selanjutnya.

3. Verifikasi Data

Verifikasi data merupakan tahapan akhir dalam analisis data selama di lapangan. Dalam tahapan ini peneliti sampai pada verifikasi data selama dilapangan baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh subyek dalam penelitian. Tahap terakhir penelitian kualitatif adalah menyimpulkan data dari keseluruhan tahap (analisis data). Dalam tahapan ini peneliti berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang awalnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

BAB II

PROFIL KALURAHAN NGLIPAR

A. Sejarah Kalurahan Nglipar

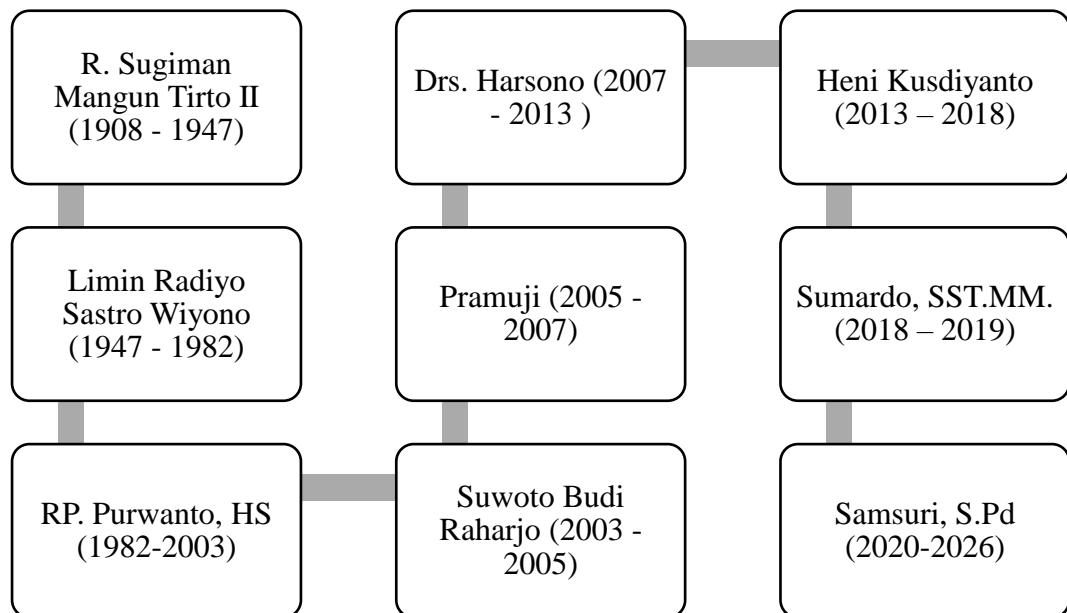
Kalurahan Nglipar merupakan salah satu Kalurahan di Kecamatan Nglipar dan merupakan Ibu Kota Kecamatan Nglipar yang terletak 10 km sebelah utara dari Kota Wonosari dan 1,5 km ebelah selatan dari Kantor Kecamatan Nglipar.

Pada tahun 1831 sampai 1908 pemerintahan dijabat oleh seorang Demang, setelah itu dijabat oleh seorang Lurah yang waktu itu nempunyai 5 padukuhan terdiri dari:

1. Padukuhan Sumberjo
2. Padukuhan Nglipar Lor
3. Padukuhan Nglipar Kidul
4. Padukuhan Ngaliyan
5. Padukuhan Kedunggranti

Dalam perkembanganya padukuhan Sumberjo dipecah menjadi dua sehingga bertambah 1 padukuhan yaitu padukuhan Mengger, sampai sekarang Desa Nglipar terdiri dari 6 padukuhan 6 RW, 38 RT.

Bagan 2. 1 Sejarah Kepemimpinan Lurah Kalurahan Nglipar



Sumber : RPJMKal 2020 Kalurahan Nglipar

B. Visi dan Misi Kalurahan Nglipar

1. Visi Kalurahan Nglipar

Nglipar Gumebyar

"Menuju Masyarakat yang lebih maju, Nasionalis, Gotong Royong, Lingkungan Bersih dan Sehat, Indah dan Nyaman, Potensi, Againis, religious, Guyub rukun, Unggul, Meningkatkan peran kelembagaan, ekonomi, budaya, yang transparan, akhlaq mulia, sopan santun, serta rahayu dan aman".

2. Misi Kalurahan Nglipar

1) Nasionalis

Meningkatkan, memupuk serta mempertahankan dan menanamkan rasa kebangsaan yang tinggi kepada Masyarakat serta jiwa patriotism dalam bingkai kebhinekaan dan NKRI, Pancasila, dan UUD 1945.

Bertoleransi beragama, guyub rukun, damai, aman, sehjuk dan sejahtera untuk warga masyarakat Nglipar.

2) Gotong Royong

Meningkatkan, Memupuk dan Mempertahankan budaya Gotong Royong, Kerjasama, Guyub Rukun, baik dikalangan intuisi pemerintahan, kehidupan di Masyarakat, Tetapi tetap mengacu pedoman juklak dan Juknis yang berlaku sesuai dengan Tugas dan Fungsinya masing-masing (Tupoksi).

3) Lingkungan Bersih dan Sehat.

Meningkatkan, Menanamkan budaya Lingkungan bersih, sehat, nyaman, tertib dan aman. Dengan Lingkungan yang bersih, sehat, nyaman dan aman akan membuat berkehidupan dan bermasyarakat yang nyaman dan asri, sehingga akan membuat warga masyarakat yang damai, bahagia dan Sejahtera

4) Indah dan Nyaman

Dengan Indah dan Nyaman Desa Nglipar dikarikerikan ibukota Kecamatan Nglipar, sehingga dipercantik, ditata, diatur baik sarana prasarana, infrastruktur jalan Desa gapura-gapura desa, Dusun Gang-gang, Normalisasi sarana umum pembuatan taman desa dan sarana Olahraga, gedung serbaguna (dalam hal ini dijadika program jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang). Dengan tujuan untuk mempercantik wajah desa, menggali potensi, asli desa, guna

meningkatkan PA, Desa serta pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Desa.

5) Potensi

Meningkatkan potensi yang ada di Desa Nglipar, baik Sumber Daya Alam) maupun SDM (Sumber Daya Manusia)
SDA: Pertanian, Perkebunan, Peternakan

SDM :Industri Kecil (Rumahan, Kuliner, Perdagangan, Jasa, Pertukangan) Kesemuannya dan bekerjasama dengan instansi -instansi Lain baik pemerintah maupun swasta. Dalam hal ini akan mengadakan pelatihan-pelatihan maupun seminar-seminar, dengan demikian bertujuan meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja dan menambah ilmu pengetahuan sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

6) Agama

Demi kedamaian ketentraman baik Pribadi, keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka dari itu warga desa nglipar harus menjalankan syariat agama yang dianutnya sesuai dengan cita-cita luhur pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang ada di Indonesia sehingga tercipta hidup rukun dalam bermasyarakat yang damai dan bertoleransi.

7) Religius

Agar Kehidupan Sosial kemasyarakatan tetap terjaga damai, dan Tenteram, bertoleransi, gotong royong, guyup rukun serta masing-

masing pengikut agama bias menjalankan ibadahnya masing-masing, Sehingga tetap terjaga kehidupan yang harmonis bermasyarakat yang damai, terram, religius, adem ayem.

8) Guyub Rukun

Meningkatkan dan mempertahankan budaya gotong royong, bekerja sama, tolong menolong, saling membantu sehingga bias menumbuhkan rasa guyup rukun sesama warga masyarakat se-Kelurahan Nglipar khususnya Kapanewon Nglipar umumnya. Demi masyarakat yang damai, tentram dan sejahtera.

9) Unggul

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalurahan Nglipar maka perlu meningkatkan pengetahuan dan Keterampilan SDM (Sumber Daya Manusia) yang ada di Kalurahan Nglipar dengan mengadakan pelatihan- pelatihan dan seminar. Meningkatkan Potensi SDA dan SDM yang ada, juga UMKM dan usaha jasa perdagangan, pertukangan untuk diadakannya pelatihan pelatihan bekerja sama dengan instansi pemerintahan maupun swasta.

10) Meningkatkan Pelayanan Publik

Meningkatkan Pelayanan publik yang ramah, cepat, tepat, dan penuh tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi.

11) Ekonomi

Meningkatkan pendapatan Asli Desa (PAD) bekerjasama dengan BUMDES Membuat Kios-Kios Strategis, meningkatkan peran

kelembagaan yang ada PKK, Karang Taruna, UMKM Kalurahan bisa bersama-sama bermusyawarah untuk membuat taman kuliner mingguan untuk meningkatkan pendapatan dan Kesejahteraan masyarakat.

12) Budaya

Meningkatkan, mempertahankan, mengaktifkan seni, kelompok-kelompok seni, budaya, kegiatan budaya, membudayakan pola hidup sehat, serta mempertahankan budaya-budaya yang ada.

13) Transparan

Menjalankan Pemerintahan Kalurahan, Kalurahan Nglipar yang tertib, disiplin, cepat, ramah, sopan, berdedikasi tinggi, transparan dan penuh tanggung jawab.

14) Akhlaq Mulia, Ramah dan Santun

Meningkatkan mempertahankan dan menjaga adat orang Jawa sebagai adat ketimuran dan warga beragama sehingga menjaga akhlag baik, budi pekerti dan bahasa yang sopan dan gerak yang santun.

15) Rahayu dan Aman.

Meningkatkan dan mempertahankan, menjaga keamanan, ketentraman, kenyamanan berkehidupan masyarakat untuk masyarakat yang rahayu dan aman.

C. Kondisi Geografis Kalurahan Nglipar

Kalurahan Nglipar merupakan kalurahan perkotaan di wilayah Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa

Yogyakarta yang memiliki potensi perputaran ekonomi masyarakat luas dengan didukung adanya Pasar Negeri dan jalur transportasi antar kapanewon dan juga banyaknya pelaku bisnis jasa dan banyaknya pedagan kecil lokal maupun dari luar wilayah kalurahan Nglipar serta keberadaan Badan Usaha Milik Kalurahan yang telah memiliki beberapa embrio penopang ekonomi rakyat.

1. Batas Wilayah

Batas wilayah adalah garis atau batasan yang menandai perbatasan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Batas wilayah bisa berupa batas administratif antara negara, provinsi, kabupaten, atau kota. Batas wilayah ini biasanya ditetapkan oleh hukum atau kesepakatan antara pihak-pihak yang bersangkutan, dan sering kali diatur secara resmi oleh pemerintah atau lembaga terkait. Batas wilayah ini penting untuk menetapkan yurisdiksi, administrasi, serta hak dan kewajiban yang berlaku di setiap wilayah tersebut. berikut batas wilayah Kalurahan Nglipar :

Sebelah Utara : Kalurahan Kedungpoh

Sebelah Selatan : Kalurahan bejiharjo, Kalurahan Karangmojo

Sebelah Barat : Kalurahan Kedungkeris

Sebelah Timur : Kalurahan Pengkol

Di Kalurahan Nglipar, struktur administratif dibagi menjadi beberapa padukuhan, yang masing-masing memiliki wilayah teritorial dan unit-unit administratif yang lebih kecil yang terbagi menjadi 6 wilayah

padukuhan yang terdiri dari 6 RW dan 38 RT. Berikut adalah rincian struktur administratif pada tingkat padukuhan:

Tabel 2. 1 Pembagian Wilayah Padukuhan, RW/RT

Kalurahan Nglipar

No	Nama Padukuhan	Jumlah RW	Jumlah RT
1	Padukuhan Sumberjo	1	4
2	Padukuhan Mengger	1	8
3	Padukuhan Nglipar Lor	1	8
4	Padukuhan Nglipar Kidul	1	6
5	Padukuhan Ngaliyan	1	9
6	Padukuhan Kedungranting	1	3
Total		6	38

Sumber : RPJMKal 2020 Kalurahan Nglipar

Dari tabel tersebut, kita dapat menarik beberapa kesimpulan. Terdapat total enam padukuhan di wilayah tersebut. Total jumlah RW (Rukun Warga) adalah enam. Total jumlah RT (Rukun Tetangga) adalah 38. Setiap padukuhan memiliki satu RW, dengan jumlah RT bervariasi antara tiga hingga sembilan. Ada variasi dalam jumlah RT di setiap padukuhan, yang mungkin mencerminkan perbedaan dalam ukuran atau kepadatan penduduk di setiap padukuhan. Setiap padukuhan memiliki satu RW, menunjukkan struktur administratif yang konsisten di seluruh wilayah. Kesimpulan ini memberikan gambaran umum tentang struktur administratif dan jumlah rumah tangga di setiap padukuhan di wilayah tersebut.

2. Kondisi Wilayah

Wilayah Kalurahan Nglipar memiliki beragam penggunaan lahan yang mencerminkan keberagaman aktivitas dan fungsi masyarakat di dalamnya. Lahan sebagian besar digunakan untuk sawah irigasi, tanah

kering/tegalan,tanah pemukiman, tanah kuburan, tanah kehutanan dan tanah lain-lain Wilayah ini memiliki karakteristik unik yang mencerminkan kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakatnya. Berikut adalah ringkasan kondisi wilayah Kalurahan Nglipar :

Tabel 2. 2 Luas lahan Kalurahan Nglipar

No	Kategori	Luas (ha)
1	Sawah Irigasi	0 ha.
2	Tanah kering/tegalan	277.2445 ha
3	Tanah pemukiman	177.6935 ha.
4	Tanah Kuburan	2.5000 ha
5	Tanah Lain-Lain	25.1630 ha
6	Tanah kehutanan	780.0000 ha
	JUMLAH	1.332.8115 ha

Sumber : RPJMKal 2020 Kalurahan Nglipar

Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa Luas Total Wilayah Kalurahan Nglipar : 1.332.8115 Ha. Ini adalah luas total wilayah yang tersedia untuk berbagai kegiatan dan penggunaan lahan. Tidak ada lahan yang digunakan sebagai sawah irigasi. Hal ini mungkin menunjukkan bahwa sistem pertanian di wilayah tersebut bergantung pada sumber air yang lain atau menggunakan metode pertanian yang tidak memerlukan irigasi. Kemudian, luas tanah kering atau tegalan mencapai 277.2445 Ha. Tanah kering ini mungkin digunakan untuk pertanian tanaman yang tidak memerlukan banyak air, seperti tanaman kering atau perkebunan yang tidak tergantung pada irigasi. Dilanjutkan

dengan tanah Pemukiman: 177.6935 Ha wilayah ini digunakan untuk pemukiman manusia. Luasnya menunjukkan keberadaan komunitas yang tinggal di wilayah tersebut. Oleh karena itu, Tanah Kuburan: 2.5000 Ha area ini digunakan sebagai tempat pemakaman, menunjukkan keberadaan populasi manusia dan kebutuhan akan fasilitas pemakaman.

Sedangkan, tanah Lain-lain: 25.1630 Ha luas tanah ini mungkin mencakup berbagai penggunaan yang tidak termasuk dalam kategori yang disebutkan sebelumnya, seperti area komersial, fasilitas umum, atau lahan yang belum diklasifikasikan secara spesifik. Dilanjutkan dengan, tanah Kehutanan: 780.0000 Ha, Ini adalah luas tanah yang diidentifikasi sebagai hutan atau area yang ditutupi oleh vegetasi hutan. Tanah kehutanan ini penting untuk konservasi alam, keanekaragaman hayati, dan fungsi ekosistem. Dengan demikian, analisis data luas wilayah Kalurahan Nglipar menunjukkan beragam penggunaan lahan, dari pertanian hingga pemukiman manusia dan konservasi alam. Hal ini menggambarkan kompleksitas dan keberagaman aktivitas manusia serta keanekaragaman alam yang ada di wilayah tersebut.

Tabel 2. 3 Penggunaan lahan Kalurahan Nglipar

No.	Padukuhuan	Luas Lahan Sawah (Ha)	Luas Bukan Sawah				Hutan Negara (Ha)	Hutan Negara Ditanami Padi (Ha)	Hutan Rakyat (Ha)	Lain-lain (Ha)	Jumlah Total (ha)	Keterangan
			Luas Tegal Wilayah (Ha)	Ditanami Padi (Ha)	Pekarangan (Ha)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	SUMBERJO	0,0000	23,0110	15,0000	30,3960	156,0000	10,0000	26,3300	11,6850	235,7370		
2	MENGGER	0,0000	47,3090	25,0000	35,0100	176,0000	150,0000	33,4850	11,8700	291,8040		
3	NGLIPAR LOR	0,0000	27,3960	20,0000	30,0000	0,0000	0,0000	34,5610	19,3510	91,9570		
4	NGLIPAR KIDUL	0,0000	42,0060	35,0000	29,0890	235,0000	65,0000	37,4450	17,2125	343,5400		
5	NGALIYAN	0,0000	57,1350	45,0000	32,3875	56,0000	27,0000	38,2560	12,6405	183,7785		
6	KEDUNGRANT I	0,0000	30,3875	20,0000	20,8110	157,0000	40,0000	12,7560	13,5035	220,9545		
Jumlah		0,0000	227,2445	160,0000	177,693	780,0000	292,0000	182,8330	86,2625	1367,77		
					5					10		Lahan Hutan Rakyat terdiri dari Tegal dan pekarangan

Sumber : RPJMKal 2020 Kalurahan Nglipar

3. Kondisi Topografi

Dari penjelasan tersebut, kita dapat membuat beberapa penjelasan tentang kondisi topografi Kalurahan Nglipar. Kalurahan Nglipar terletak 11 kilometer sebelah utara dari pusat pemerintahan Kabupaten Gunungkidul. Ini menandakan bahwa kalurahan ini terletak agak jauh dari pusat administrasi kabupaten, namun masih dalam jarak yang dapat diakses secara relatif mudah. Kalurahan Nglipar memiliki ketinggian +200 meter di atas permukaan laut. Ketinggian yang relatif tinggi ini bisa memberikan

karakteristik topografi yang beragam, termasuk kemungkinan adanya lereng, bukit, atau dataran tinggi.

Dengan ketinggian yang relatif tinggi, kemungkinan besar Kalurahan Nglipar memiliki topografi yang berbukit-bukit atau bergelombang. Ini bisa mencakup lereng yang curam di beberapa bagian, serta lembah-lembah yang mungkin ada di antara bukit-bukit tersebut. Topografi yang berbukit atau bergelombang dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat setempat, termasuk pertanian, akses transportasi, dan infrastruktur. Kemiringan lereng dan kondisi tanah yang bervariasi juga bisa memengaruhi cara penggunaan lahan dan pengelolaan sumber daya alam. Wilayah dengan topografi berbukit sering kali memiliki risiko bencana alam tertentu, seperti tanah longsor atau banjir bandang.

Oleh karena itu, perencanaan pengembangan wilayah dan mitigasi risiko bencana harus memperhitungkan karakteristik topografi ini. Dengan demikian, kondisi topografi Kalurahan Nglipar yang terletak di ketinggian +200 meter di atas permukaan laut dan berjarak 11 kilometer dari pusat pemerintahan Kabupaten Gunungkidul menunjukkan adanya potensi untuk berbagai jenis aktivitas dan juga memerlukan perhatian khusus dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan wilayah.

Berdasarkan data diatas maka dapat disimpulkan bahwa debagian besar wilayah Kalurahan Nglipar memiliki topografi yang relatif data. Wilayah datar cenderung memiliki tanah yang lebih mudah untuk dikembangkan secara pertanian atau untuk pemukiman manusia. Mereka

juga cenderung memiliki aksesibilitas yang baik karena kurangnya rintangan geografis. Selain itu, meskipun hanya menyumbang 20% dari total wilayah, wilayah ombak tetap memiliki kepentingan yang signifikan. Topografi berombang cenderung menawarkan beragam kondisi tanah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian yang lebih beragam atau untuk pengembangan pariwisata alam.

Tidak adanya wilayah Kalurahan Nglipar yang diklasifikasikan sebagai berbukit sampai bergunung menunjukkan bahwa tidak ada bagian dari wilayah yang memiliki ketinggian signifikan. Hal ini mungkin menunjukkan bahwa wilayah tersebut terletak di dataran rendah atau dataran sedang, yang dapat mempengaruhi iklim, jenis tanah, dan jenis vegetasi yang mendominasi.

Analisis ini memberikan gambaran yang cukup jelas tentang kondisi topografi wilayah Kalurahan Nglipar. Dengan mayoritas wilayah yang datar, fokus pengembangan dapat ditempatkan pada pemanfaatan lahan untuk kegiatan pertanian, perkotaan, atau industri yang memanfaatkan keberadaan tanah datar. Sedangkan, wilayah berombak dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang membutuhkan variasi kondisi tanah, seperti pertanian berbasis peternakan atau pariwisata alam

D. Kondisi Demografi Kalurahan Nglipar

Dalam rangka menopang keberlangsungan kemajuan Kalurahan Nglipar, utamanya didukung oleh statistik kependudukan yang secara rinci dan komunitas terbagi menjadi beberapa kelompok, baik dari segi gender,

umur, tingkat pendidikan, dan mata pencaharian. Sebagai gambaran tingkat perkembangan penduduk atau Sumber Daya Manusia yang tersedia di wilayah Kalurahan Nglipar adalah sebagai berikut :

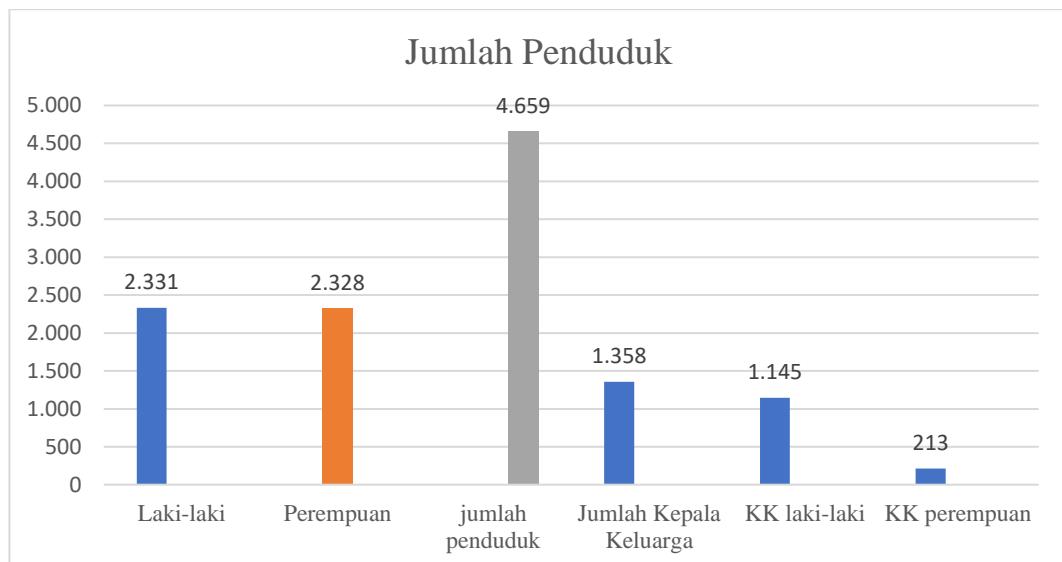
1. Data Jumlah Penduduk Dan Jumlah Kepala Keluarga Kalurahan Nglipar

Data berdasarkan jumlah penduduk dan jumlah kepala keluarga Kalurahan Nglipar adalah informasi statistik yang menggambarkan populasi penduduk dan struktur keluarga di wilayah Kalurahan Nglipar. Dalam konteks ini, "jumlah penduduk" merujuk kepada total individu yang tinggal di Kalurahan Nglipar, sedangkan "jumlah kepala keluarga" mengacu pada total jumlah rumah tangga atau keluarga yang ada di wilayah tersebut.

Analisis data berdasarkan jumlah penduduk dan jumlah kepala keluarga memberikan wawasan tentang distribusi demografis dan struktur sosial di Kalurahan Nglipar. Ini dapat memberikan pemahaman tentang komposisi gender penduduk, proporsi rumah tangga, serta karakteristik demografis lainnya seperti usia, pekerjaan, pendidikan, dan sebagainya.

Informasi ini penting untuk perencanaan pembangunan, alokasi sumber daya, dan pengambilan keputusan dalam berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, perumahan, dan layanan masyarakat lainnya. Dengan memahami data ini, pemerintah dan lembaga terkait dapat merancang kebijakan yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Kalurahan Nglipar. Tabel jumlah penduduk dan jumlah kepala keluarga disajikan sebagai berikut :

Grafik 2. 1 Jumlah Penduduk dan jumlah kepala keluarga Kalurahan Nglipar



Sumber : RPJMKal 2020 Kalurahan Nglipar

Berdasarkan data di atas dapat kita lihat bahwa total jumlah penduduk Kalurahan Nglipar adalah 4.659 jiwa. Dengan jumlah penduduk laki-laki adalah 2.331 jiwa, sedangkan penduduk perempuan adalah 2.328 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat sedikit lebih banyak penduduk laki-laki daripada penduduk Perempuan. Dari jumlah kepala keluarga tersebut, 1.145 jiwa merupakan kepala keluarga laki-laki, sedangkan 213 jiwa merupakan kepala keluarga perempuan. Perbandingan ini menunjukkan dominasi laki-laki dalam peran sebagai kepala keluarga.

Dari analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa wilayah tersebut memiliki jumlah penduduk yang cukup signifikan, dengan sedikit kelebihan jumlah penduduk laki-laki dibandingkan perempuan. Selain itu, terdapat dominasi laki-laki dalam peran sebagai kepala keluarga, meskipun jumlah kepala keluarga perempuan juga signifikan. Hal ini penting untuk

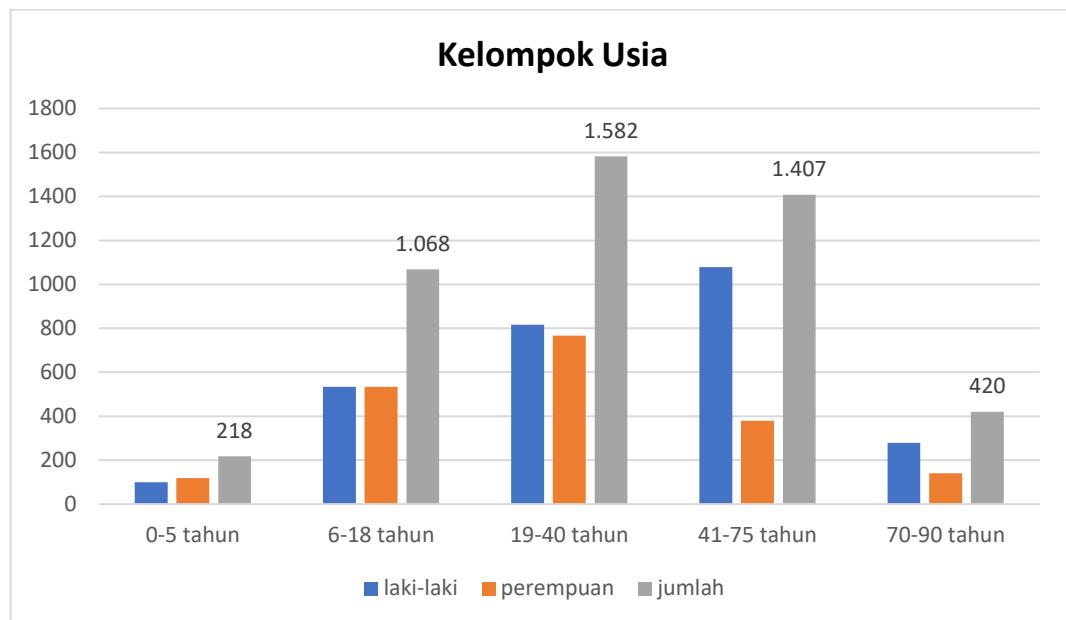
dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan dan program-program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

2. Data Berdasarkan Kelompok Usia

Data berdasarkan kelompok usia adalah informasi statistik yang dikelompokkan berdasarkan rentang usia tertentu. Analisis data berdasarkan kelompok usia memberikan pemahaman tentang distribusi usia dalam populasi suatu wilayah atau kelompok tertentu. Hal ini dapat memberikan informasi penting tentang struktur demografis, pola pertumbuhan populasi, tingkat ketergantungan, kebutuhan layanan kesehatan, pendidikan, dan sosial, serta tantangan dan peluang yang terkait dengan populasi dalam rentang usia tertentu.

Data berdasarkan kelompok usia sering digunakan oleh pemerintah, lembaga penelitian, dan organisasi non-profit untuk merencanakan kebijakan dan program yang sesuai dengan kebutuhan berbagai kelompok usia dalam masyarakat. Misalnya, informasi ini dapat digunakan untuk merancang program kesehatan yang ditargetkan untuk kelompok usia tertentu, mengidentifikasi kebutuhan pendidikan atau pelatihan khusus, atau mengevaluasi dampak program sosial pada berbagai kelompok usia. Berikut Data Berdasarkan kelompok usia kalurahan Nglipar :

Grafik 2. 2 Kelompok Usia Kalurahan Nglipar



Sumber : RPJMKal 2020 Kalurahan Nglipar

Dari diagram di atas dapat kita simpulkan bahwa distribusi penduduk berdasarkan kelompok usia dan jenis kelamin menunjukkan variasi, dengan beberapa kelompok usia memiliki perbedaan signifikan dalam jumlah laki-laki dan perempuan. Hal ini penting untuk dipertimbangkan dalam perencanaan program-program kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik demografis setiap kelompok usia.

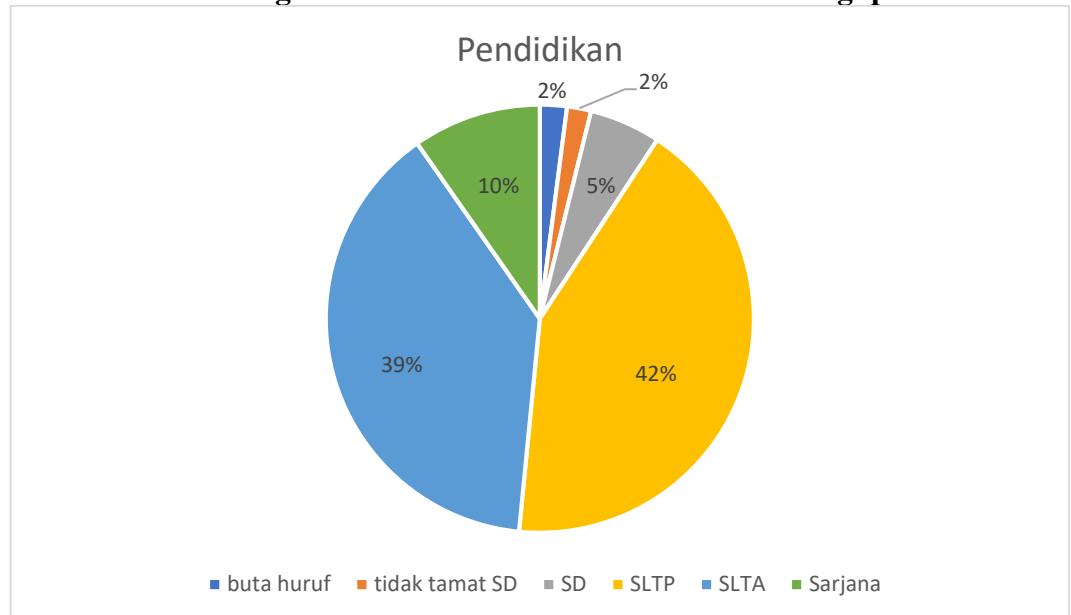
3. Tingkat Pendidikan Penduduk Kalurahan Nglipar

Tingkat pendidikan penduduk Kalurahan Nglipar mengacu pada tingkat atau tingkat pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk yang tinggal di wilayah tersebut. Informasi ini mencakup berbagai tingkat pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi dan

profesional. Analisis tingkat pendidikan penduduk Kalurahan Nglipar memberikan gambaran tentang tingkat literasi, akses pendidikan, dan kualifikasi penduduk dalam wilayah tersebut. Data ini dapat memberikan wawasan tentang seberapa baik penduduk setempat telah mengakses pendidikan formal dan sejauh mana mereka telah mencapai kualifikasi pendidikan tertentu.

Informasi ini penting untuk merencanakan program pendidikan, meningkatkan aksesibilitas pendidikan, dan memastikan bahwa kebutuhan pendidikan masyarakat terpenuhi. Selain itu, pemahaman tentang tingkat pendidikan penduduk juga dapat memberikan pandangan tentang potensi ekonomi dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan kerja yang memerlukan keterampilan dan pengetahuan tertentu. Secara umum, data tingkat pendidikan penduduk Kalurahan Nglipar akan mencakup persentase individu dalam berbagai kategori pendidikan, seperti tidak sekolah, lulusan SD, SMP, SMA, diploma, sarjana, dan seterusnya. Berikut tabel Tingkat Pendidikan Penduduk Kalurahan Nglipar :

Grafik 2. 3 Tingkat Pendidikan Penduduk Kalurahan Nglipar



Sumber : RPJMKal 2020 Kalurahan Nglipar

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa terdapat 92 jiwa penduduk yang masih buta huruf, artinya mereka belum memperoleh pendidikan formal. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam akses pendidikan atau mungkin kurangnya kesempatan untuk memperoleh pendidikan di kalurahan tersebut. Sedangkan, ada 82 jiwa penduduk yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar (SD). Meskipun lebih rendah dibandingkan dengan jumlah buta huruf, masih terdapat sebagian penduduk yang belum menyelesaikan pendidikan dasar, yang dapat menjadi fokus untuk program-program pemutakhiran keterampilan atau kesetaraan pendidikan. Untuk, jumlah penduduk yang telah menyelesaikan pendidikan dasar (SD) adalah 243 jiwa. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk telah mengenyam pendidikan dasar, meskipun masih terdapat sebagian kecil yang belum menyelesaikannya. Oleh karena itu, pada tingkat

pendidikan SLTP memiliki jumlah penduduk yang lebih tinggi, yaitu 1.907 jiwa. Ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk telah menyelesaikan pendidikan menengah pertama atau setara. Serta, ada 1.746 jiwa penduduk yang telah menyelesaikan pendidikan menengah atas atau setara. Ini menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya pendidikan lanjutan dalam masyarakat. Selain dari itu juga, pada jumlah penduduk yang telah menempuh pendidikan tinggi (Sarjana) adalah 438 jiwa. Ini menunjukkan adanya minat dan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di kalurahan tersebut.

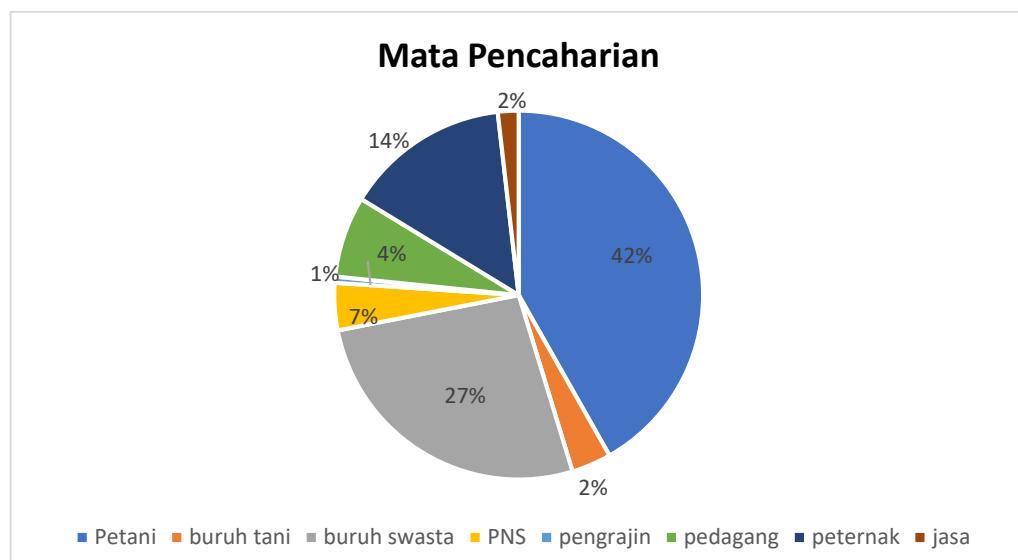
Dari analisis ini, terlihat bahwa mayoritas penduduk Nglipar telah menempuh pendidikan hingga tingkat menengah, meskipun masih terdapat sebagian kecil yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau tidak memiliki pendidikan formal. Hal ini menunjukkan pentingnya upaya untuk memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kesetaraan pendidikan di kalurahan tersebut.

4. Data Penduduk Menurut Mata Pencaharian Kalurahan Nglipar

Data Penduduk Menurut Mata Pencaharian Kalurahan Nglipar merujuk pada informasi statistik tentang pekerjaan atau mata pencaharian penduduk di Kalurahan Nglipar. Data ini biasanya mencakup berbagai jenis pekerjaan yang dilakukan oleh penduduk di wilayah tersebut, seperti petani, pedagang, buruh, pegawai negeri, dan sebagainya. Tujuan dari data ini bisa beragam, mulai dari perencanaan pembangunan ekonomi lokal, penentuan alokasi sumber daya, hingga evaluasi program-program pemberdayaan

masyarakat. Dengan memahami pola mata pencaharian penduduk, pemerintah atau lembaga terkait dapat merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk di wilayah tersebut.

Grafik 2. 4 Penduduk Menurut Mata Pencaharian Kalurahan Nglipar



Sumber : RPJMKal 2020 Kalurahan Nglipar

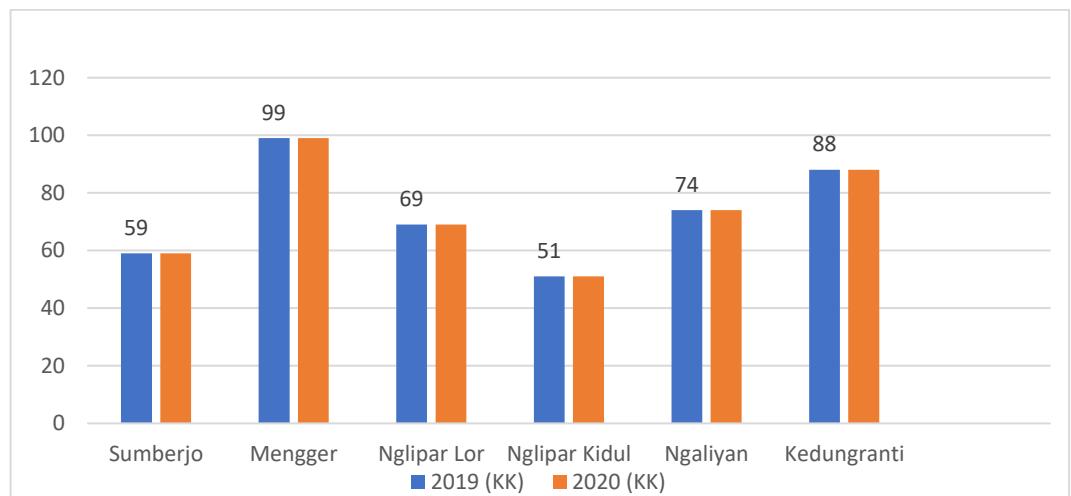
Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa mayoritas individu tergolong dalam kategori Buruh Swasta dengan jumlah 689 jiwa, diikuti oleh Petani dengan jumlah 1.081 jiwa. Profesi lainnya memiliki jumlah yang lebih rendah seperti Peternak, Pedagang, Buruh Tani, dan lain-lain. Jumlah PNS (Pegawai Negeri Sipil) berjumlah 107 jiwa, yang menunjukkan adanya kehadiran sektor pelayanan publik di dalam data tersebut.

5. Data Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan di Kalurahan Nglipar dengan pendekatan Kumah Tangga Sasaran menunjukkan bahwa pada tahun 2007 terdapat 95.722

rumah tangga miskin dan tahun 2008 menjadi 74.632 rumah tangga miskin. Angka kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul pada tiap-tiap kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.28 berikut ini:

**Grafik 2. 5 Angka Kemiskinan Tahun 2019-2020
(Pendekatan Satuan Rumah Tangga Sasaran)**



Sumber : RPJMKal 2020 Kalurahan Nglipar

Meskipun persentase penduduk mengalami penurunan, namun masih diperlukan kebijakan pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Kebijakan yang dilakukan antara lain dengan cara peningkatan akses pelayanan pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, peningkatan pendapatan, dan air bersih bagi penduduk miskin serta perluasan lapangan kerja di berbagai sektor.

Peningkatan akses pelayanan pendidikan dapat dilakukan melalui kegiatan pemberian beasiswa bagi siswa miskin, penyediaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan penyediaan sarana dan prasarana sekolah. Peningkatan akses pelayanan bidang kesehatan dapat dilakukan dengan pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin, peningkatan sarana dan

prasarana pelayanan kesehatan dasar, penanganan masalah gizi buruk, dan penyediaan air bersih bagi penduduk miskin.

Pembangunan akan disebut berhasil jika jumlah masyarakat miskin relatif sedikit dan mereka mampu mengakses kebutuhan dasar secara mudah dan murah. Selain itu juga pendapatan dapat terdistribusi secara merata dan tidak menumpuk pada sekelompok masyarakat tertentu.

6. Bencana Alam

Kalurahan Nglipar memiliki beberapa ancaman bencana yaitu: gempa bumi, kekeringan, erosi dan sedimentasi, epidemi penyakit menular, kejadian luar biasa, banjir, kebakaran, angin puting beliung, kegagalan teknologi, kecelakaan transportasi dan konflik sosial. Pada tahun 2007 jumlah korban bencana alam sebanyak 8 KK, tahun 2008 sebanyak 2 KK, dan pada tahun 2010 sebanyak 3 KK.

Kawasan rawan bencana alam di Kalurahan Nglipar meliputi:

- a. Kawasan rawan gempa bumi di seluruh wilayah Kalurahan dengan tingkat resiko paling tinggi berada pada jalur sesar/patahan aktif;
- b. Kawasan rawan banjir di Daerah Aliran Sungai Oyo meliputi:
 1. Padukuhan Kedungranti.
 2. Padukuhan Nglipar Kidul bagian selatan.
- c. Kawasan rawan angin topan di seluruh wilayah desa

E. Keadaan Ekonomi

Perekonomian Kalurahan Nglipar tumbuh subur di dalam rangkaian kegiatan sektor-sektor yang beraneka ragam. Mata pencaharian penduduk

di Kalurahan Nglipar terfokus pada bidang pertanian, di mana setiap harinya para petani sibuk merawat kebun untuk mendapatkan hasil panen yang bagus. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi belum mampu berkembang secara optimal kearah pengembangan sektor industri dan pengolahan, dengan demikian sektor pertanian masih menjadi tumpuan mata pencaharian masyarakat secara umum. Hal ini mengisyaratkan bahwa perencanaan kedepan tidak boleh mengesampingkan program- program pembangunan pertanian. Kebijakan untuk mendorong perekonomian bergeser ke sektor industri dan pengolahan lebih ditekankan kepada kesiapan bahan baku yang berbasis produk pertanian, kesiapan sumber daya manusia, dan persiapan jaringan pemasaran. Berikut beberapa sektor yang ada di Kalurahan Nglipar :

1. Sektor Pertanian

Kondisi tanah pertanian yang cukup kritis, khususnya pada musim kemarau sehingga produktivitas menjadi menurun. Namun dengan adanya dukungan dari pemerintah baik dari dinas pertanian, perkebunan maupun dari dinas koperasi dan PKM untuk mengembangkan sektor pertanian sehingga sektor ini mampu bertahan bahkan dikembangkan dengan penguatan kelembagaan pertanian serta penerapan sistem pertanian yang berbasis intensifikasi lahan. Produksi pertanian tanaman pangan di Kalurahan Nglipar yang terbesar yaitu padi ladang, jagung, ketela pohon, kedelai dan kacang tanah. Salah satu contoh di bawah ini yaitu padi ladang.

Gambar 2. 1 Pertanian di Kalurahan Nglipar



Sumber : Peneliti Tahun 2024

Salah satu potensi terbesar di Kalurahan Nglipar adalah ladang persawahannya, meskipun sering menghadapi tantangan kekurangan air saat musim kemarau. Masyarakat setempat yang sebagian besar bermata pencarian sebagai petani, telah mengadaptasi teknik bercocok tanam di ladang yang lebih efisien dalam penggunaan air untuk mengatasi kendala ini. Ladang-ladang tersebut tetap produktif dengan mengandalkan tanaman yang lebih tahan kekeringan dan sistem irigasi yang dikelola secara bijak. Meskipun tantangan kekurangan air cukup signifikan, ketekunan dan kreativitas para petani dalam mengelola ladang memastikan bahwa sektor pertanian tetap menjadi sumber penghidupan utama dan kontributor penting bagi perekonomian Kalurahan.

2. Sektor Kehutanan

Kalurahan Nglipar, kehidupan penduduknya bergantung pada pengelolaan hutan. Lahan milik penduduk yang pada umumnya dengan luasan kecil dan kondisinya kurang subur, telah membuat lahan kawasan

hutan menjadi sasaran untuk digarap sebagai penopang kebutuhan hidupnya, yang pada umumnya kurang mampu.

Pengelolaan hutan negara diarahkan lebih pada fungsi konservasi sehingga memiliki peran sangat strategis untuk mendukung ekonomi wilayah, ekowisata, pusat pendidikan. dan ekonomi masyarakat. Hutan rakyat di Kalurahan Nglipar pada umumnya adalah hutan produksi dan berperan dalam peningkatan pendapatan masyarakat sekaligus lapangan pekerjaan bagi masyarakat pedesaan.

Gambar 2. 2 Kehutanan di Kalurahan Nglipar



Sumber : Peneliti Tahun 2024

Selain itu, keberadaan hutan negara di Kalurahan Nglipar memiliki peranan dan kedudukan yang penting dan unik. Di satu sisi, hutan negara itu sejak lama merupakan hutan produksi yang menghasilkan komoditas kehutanan, yang memiliki arti penting bagi perolehan pendapatan asli daerah. Di sisi yang lain, keberadaan hutan negara di Kalurahan Nglipar berkaitan dengan upaya pemerintah untuk menghijaukan kembali lahan kritis yang ada di wilayah ini.

Selain hutan negara, sasaran usaha rehabilitasi lahan kritis terutama ditujukan pada lahan pekarangan milik penduduk, yang dikenal dengan istilah hutan rakyat. Dari hutan rakyat ini berbagai potensi kehutanan dan perkebunan dapat dikembangkan, dengan beberapa hasil komoditas kehutanan seperti kayu jati, mahoni, sonokeling, bambu, akasia, dan sebagainya.

3. Perkebunan

Perkebunan adalah kegiatan budidaya tanaman tertentu dalam skala besar di lahan yang luas, biasanya dilakukan dengan tujuan komersial. Tanaman yang dibudidayakan di perkebunan umumnya adalah tanaman tahunan yang memiliki nilai ekonomi tinggi, seperti kelapa, pisang, mangga, dan berbagai jenis buah-buahan dan rempah-rempah. Perkebunan dapat dioperasikan oleh perorangan, kelompok masyarakat. Kegiatan perkebunan meliputi penanaman, pemeliharaan, panen, dan pengelolaan pasca panen untuk memastikan kualitas produk yang dihasilkan. Perkebunan memainkan peran penting dalam perekonomian banyak negara, menyediakan lapangan kerja, serta produk yang menjadi komoditas ekspor penting.

Gambar 2. 3 Perkebunan di Kalurahan Nglipar



Sumber : Peneliti Tahun 2024

Perkebunan yang paling menonjol di Kalurahan Nglipar adalah perkebunan dipekarangan dengan komoditi kelapa, pisang, dan mangga serta buah buahan yang lain.

4. Sektor Peternakan

Pada tahun 2019 peternakan sapi potong merupakan satu-satunya jenis ternak besar di Kalurahan Nglipar. karena sebagian besar penduduk Kalurahan Nglipar adalah petani, maka mereka juga mempunyai binatang piaran yang biasanya berupa binatang ternak. sebagian besar adalah berternak sapi. disamping sebagai tabungan, juga dapat dimanfaatkan kotorannya sebagai pupuk organik yang murah, selain sapi, kambing dan ayam kampung juga banyak dipelihara oleh masyarakat. sama seperti sapi, kambing dan ayam juga merupakan tabungan dan mudah menjualnya bila memerlukan uang, selain itu, ada juga domba. Berdasarkan penilaian dari berbagai pihak menyatakan bahwa Nglipar termasuk penghasil ternak dan budaya masyarakat petani untuk memelihara ternak turut memberikan andil dalam peningkatan populasi ternak.

Dari sisi harga komoditas peternakan relatif terus meningkat sehingga menjadi peluang bagi para petani untuk mengembangkan secara lebih serius dan bukan hanya sebagai pekerjaan sambilan.

Beberapa potensi antara lain adalah:

Jumlah populasi ternak dan peternak sangat besar;

- 1) Sumber daya manusia Dinas Peternakan Kabupaten Gunungkidul secara kuantitas dan kualitas relatif cukup baik (petugas medis, paramedis, mantri ternak dan inseminator);
- 2) Ketersediaan infrastruktur (Puskeswan, Pengolahan pakan ternak);
- 3) Budaya memelihara ternak di masyarakat sangat tinggi;
- 4) Ketersediaan lahan cukup;
- 5) Permintaan pasar yang tinggi didalam dan luar daerah;
- 6) Bebas beberapa penyakit hewan menular strategis dan;
- 7) Dukungan Pemerintah baik Pusat maupun Daerah terhadap pengembangan sapi bibit sapi putih / Peranakan Onggole (PO).

Kendala pengembangan sektor ini adalah keterbatasan persediaan pakan ternak, khususnya pada musim kemarau sehingga sulit mengembangkan skala ternak dan kurangnya modal usaha.

**Tabel 2. 4 Perkembangan Populasi Ternak di Kalurahan Nglipar
Tahun 2017 – 2019**

No	Jenis Ternak	Tahun (Ekor)		
		2017	2018	2019
1	Sapi Potong	820	829	833
2	Kambing	1.086	136. 913	137. 958
3	Babi	-	-	-
4	Ayam Buras	1.947	1. 982	1. 866
5	Ayam Ras Pedaging	21.573	32. 780	48. 943

Sektor : RPJMKal 2020 Kalurahan Nglipar

5. Sektor Perindustrian

Perkembangan industri kecil dan menengah di Kalurahan Nglipar dimasa mendatang bisa dikembangkan (prospektif) namun masih

memerlukan tahapan yang panjang khususnya untuk transfer teknologi. Sektor ini banyak didominasi oleh industri rumah tangga, Industri kecil dan mikro ini berbasis pada hasil pertanian, dan kehutanan diantaranya industri makanan ringan dan industri kayu

6. Sektor Perdagangan

Beberapa kurun waktu lalu perekonomian nasional menunjukkan kondisi buruk dengan tingkat kepercayaan semua pihak yang hampir-hampir hilang. Tingkat kepercayaan yang tradah itu telah menjadi ancaman yang serius di bidang ekonomi, sosial dan politik. Karena itu pemulihan dan peningkatan ekonomi tidak dapat dilakukan semata-mata oleh kegiatan ekonomi tetapi harus ditunjung oleh bidang yang lain khususnya politik dan keamanan.

7. Sektor Koperasi

Koperasi pada saat ini cenderung melemah dan lesu karena greget dari pemerintah pusat terhadap koperasi kurang terasa, tidak seperti pada masa-masa orde baru. Hal ini bukan berarti pemerintah saat ini tidak mengedepankan koperasi akan tetapi karena kebijakan- kebijakan perekonomian global seperti halnya AFTA (ASEAN Free Trade Area) China dan lain sebagainya. Padahal koperasi mempunyai kebijakan mengedepankan asas kekeluargaan sehingga dalam bersaing terutama diluar koperasi bahkan ke tingkat mancanegara perlu pembenahan dan peningkatan sumber daya manusia.

8. Sektor Pariwisata

Sektor pariwisata belum bisa memberikan kontribusi terhadap program dikarenakan tidak adanya wisata alam yang diprioritaskan, namun dari beberapa potensi keanekaragaman budaya lokal dan Kalurahan Nglipar dilewati oleh sungai Oya, belum bisa mendukung wisata alam di Kapanewon Nglipar.

F. Sarana dan Prasarana Kalurahan Nglipar

Infrastruktur yang mendukung kegiatan sosial ekonomi, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, dan pengembangan sentra produksi meliputi: jalan dan jembatan, irigasi dan prasarana permukiman (air bersih, drainase, dan sanitasi masyarakat).

Kondisi Insfrastruktur di Kalurahan Nglipar adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 5 Data Kondisi Jalan Tahun 2019

No.	Jenis Jalan	Panjang Jalan	Kondisi		
			Baik	Sedang	Rusak
1	Aspal	7.350	5. 445	765	1.140
2	Cor Rabat Beton	12.569	7. 884	3. 465	1.220
3	Batu	16.930	2. 450	12. 930	1.550
4	Tanah	5.320	-	5. 320	-
Jumlah		40. 539	13. 814	22. 645	4. 080

Sumber : RPJMKal 2020 Kalurahan Nglipar

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas jalan berada dalam kondisi Sedang, sementara perhatian khusus mungkin diperlukan untuk memperbaiki jalan dalam kondisi Rusak. Selain itu, jenis jalan Batu

mungkin memerlukan perhatian khusus karena mayoritas panjang jalan dalam kondisi Sedang.

Tabel 2. 6 Data Kondisi Jembatan Tahun 2019

No.	Lokasi	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Sedang	Rusak
1	Sumberjo	2 unit	2 unit	-	-
2	Mengger	3 unit	3 unit	-	-
3	Nglipar Lor	4 unit	4 unit	-	-
4	Nglipar Kidul	7 unit	5 unit	2 unit	-
5	Ngaliyan	3 unit	2 unit	1 unit	-
6	Kedungranti	2 unit	1 unit	1 unit	-
Jumlah		21 unit	18 unit	4 unit	-

Sumber : RPJMKal 2020 Kalurahan Nglipar

Data data di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas jembatan berada dalam kondisi Baik. Namun, perlu perhatian khusus terhadap jembatan yang dalam kondisi rusak untuk perbaikan dan pemeliharaan yang tepat waktu demi keamanan dan fungsionalitas infrastruktur jembatan.

a. Pelayanan Air Bersih

Guna mencukupi kebutuhan air bersih maka dilakukan dengan beberapa hal di antaranya:

1. Pengembangan sistem perpipaan yang diambil dari sumur bor (Sebagian Padukuhan Mengger dan Nglipar Lor) dan sumber mata air bawah tanah (Sebagian Padukuhan Kedungranti).
2. Saluran PDAM
3. Sumur Dangkal
4. Sumur Bor
5. Sumber Mata Air
6. Dropping air

Dropping air dilakukan dalam kondisi darurat yang biasanya meliputi wilayah wilayah: padukuhan yang rawan air seperti Padukuhan Sumberjo dan Padukuhan Mengger.

G. Kondisi Pemerintah Kalurahan

Pemerintahan Kalurahan adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan Kalurahan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan Kalurahan yaitu Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal). Dalam menjalankan roda pemerintahan, Pemerintah Kalurahan memiliki fungsi ganda yaitu sebagai penyelenggara pemerintahan sekaligus sebagai penyelenggara dalam pembangunan di Kalurahan Sebagai penyelenggara pemerintahan di Kalurahan berperan utama merigatur tatanan kehidupan bermasyarakat di Kalurahan dalam kerangka regulasi, sedangkan sebagai penyelenggara dalam pembangunan desa berperan sebagai pelaksana dan sebagai penanggungjawab dalam keseluruhan proses pembangunan yang dilaksanakan di Kalurahan yaitu dalam kerangka investasi dan penyediaan barang serta pelayanan publik.

1. Pembagian Wilayah Kerja

Kalurahan Nglipar dalam penyelenggaraan pemerintahan secara administratif terbagi dalam 6 Padukuhan 6 RW dan 38 RT, secara lengkap sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

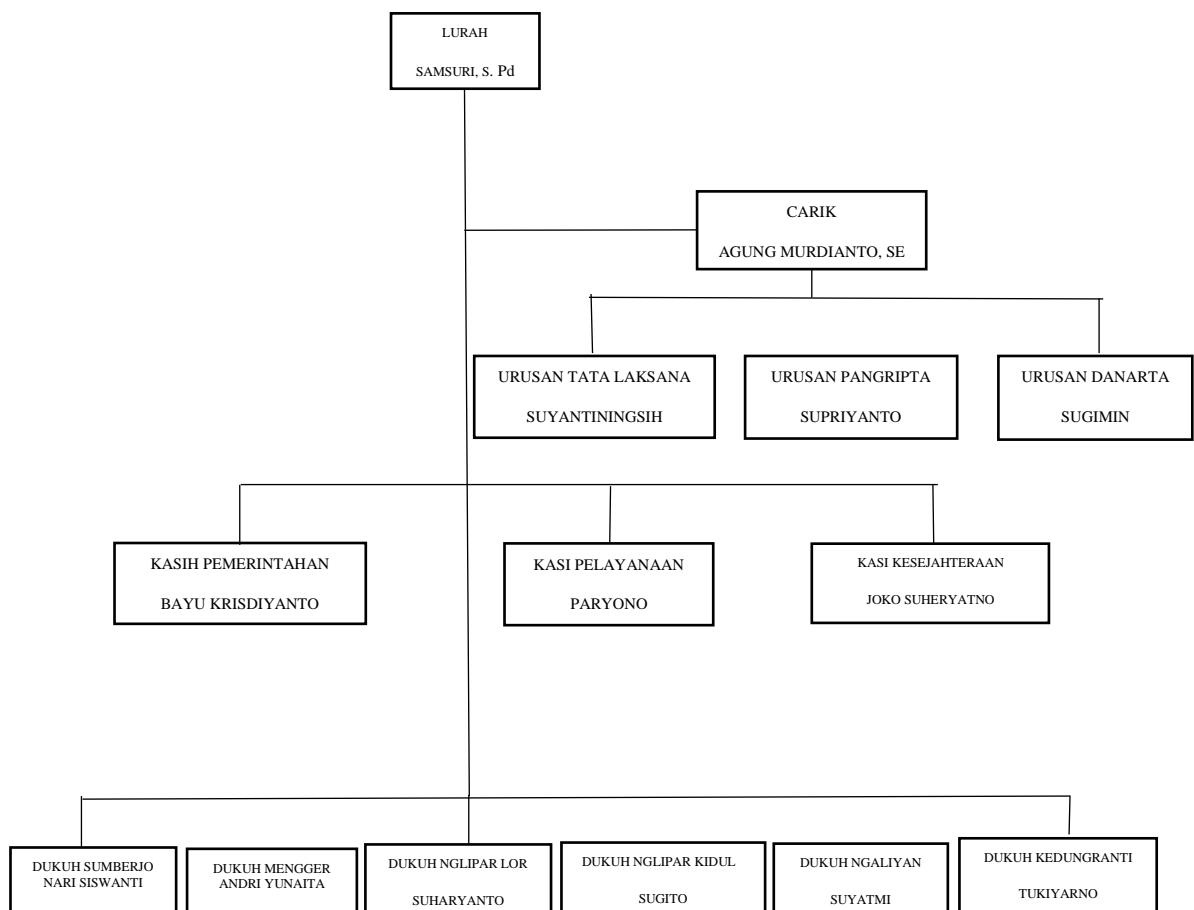
Tabel 2. 7 Daftar Padukuhan dan RT di Desa Nglipar

No.	Padukuhan	Jumlah RT
1	Sumberjo	04 RT
2	Mengger	08
3	Nglipar Lor	08
4	Nglipar Kidul	06 RT
5	Ngaliyan	RT. 09
6	Kedungranti	RT. 03

Sumber : RPJMKal 2020 Kalurahan Nglipar

2. Struktur Pemerintah Kalurahan Nglipar

Bagan 2. 2 Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan Nglipar



(Sumber : RPJMKal 2020 Kalurahan Nglipar)

Lembaga Pemerintahan Kalurahan Nglipar terdiri dari Lurah beserta Pamong dan Badan Permusyawaratan Kalurahan. Lurah dan Pamong berperan sebagai pelaksana kegiatan dan teknis sedangkan Badan Permusyawaratan Kalurahan memiliki berperan membahas dan menyepakati rancangan peraturan kalurahan bersama Lurah serta menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat sebagai referensi terhadap pembuatan program.

3. Organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa

Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Kalurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Kalurahan

Jenis Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, yaitu:

- a. Bidang Rukun Tetangga (RT)
- b. Bidang Rukun Warga (RW)
- c. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Padukuhan (LPMP)
 1. Terbatasnya upaya-upaya masyarakat pada kegiatan pembinaan generasi muda dan pengembangan keolahragaan, seni budaya dan sosial
 2. Belum terwujudnya pola hidup bersih sehat masyarakat
 3. Belum tertatanya lingkungan sanitasi yang baik di masyarakat Kalurahan
 4. Diwilayah pemukiman rentan terjadi bencana banjir yaitu diwilayah pemukiman pinggiri sungai Oya

5. Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan masih relatif rendah
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 1. Terbatasnya upaya-upanya dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat
 2. Kesempatan kerja dan usaha masih sempit dan belum memadahi
 3. Terbatasnya kesempatan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat khususnya bagi usia produktif dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan
 4. Belum adanya persiapan kongkrit tentang arah konsep BUMKal sehingga butuh bimbingan khusus dalam pelaksanaanya
 5. Terbatasnya informasi dan pengetahuan masyarakat dalam usaha kegiatan sertamenguatkan daya jual produknya dipasaran
 6. Terbatasnya modal dan manajemen bagi pelaku usaha kecil
- e. Bidang Karang Taruna
- f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan

H. Organisasi/Lembaga Perlindungan Masyarakat

Kalurahan Nglipar memiliki organisasi perlindungan masyarakat yang merupakan lembaga atau badan yang bertujuan untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan keselamatan masyarakat serta memberikan perlindungan terhadap berbagai risiko dan ancaman yang mungkin timbul. Organisasi ini akan bertanggung jawab atas berbagai aspek, termasuk penegakan hukum, pemadam kebakaran, layanan darurat medis,

penanganan bencana alam, dan berbagai kegiatan lainnya yang berhubungan dengan perlindungan dan keselamatan masyarakat. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi masyarakat serta memberikan respon yang cepat dan efektif terhadap berbagai situasi darurat atau kejadian yang membahayakan.

Untuk melindungi masyarakat di Kalurahan Nglipar, Pemerintah Kalurahan Nglipar menempatkan pos-pos keamanan yang telah dibentuk disetiap Padukuhan dan di setiap RT untuk melindungi masyarakat agar tetap aman. Selain itu juga, diimbangi dengan adanya kerja sama antara Babinsa, Satuan Perlindungan Masyarakat yang di fasilitasi seragam, dan Jaga warga yang baru terbentuk dibulan November tahun 2023.

BAB III

GOVERNING PEMERINTAH DESA DALAM MELINDUNGI PENGRAJIN

Pada bagian ini, peneliti akan membahas dan menelaah lebih jauh terkait Governing Pemerintah desa dalam melindungi pengrajin di Kalurahan Nglipar, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian ini merujuk pada fokus penelitian dan temuan lapangan, dengan menyajikan data secara terperinci dan eksplisit guna mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang telah diajukan oleh peneliti ke informan, dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Setelah melakukan penelitian dilapangan, peneliti telah memperoleh data dari narasumber yang telah diidentifikasi dengan menyesuaikan batasan-batasan penelitian ini. Selanjutnya peneliti akan menganalisis data yang diperoleh. Adapun tujuan dari analisis data adalah untuk menyederhanakan data, guna memperoleh gambaran yang jelas bagaimana proses *Governing* pemerintah desa dalam melindungi pengrajin di kalurahan Nglipar.

A. Perlindungan Pemerintah Kalurahan terhadap Pengrajin

Perlindungan pemerintah kalurahan terhadap pengrajin merupakan cerminan komitmen dan efektivitas dalam memberikan perlindungan sosial yang merata dan berkelanjutan. Oleh karena itu, melalui kebijakan-kebijakan proaktif dan program-program nyata, Pemerintah Kalurahan

dapat memastikan bahwa pengrajin merasa aman dan dilindungi dalam setiap aspek kehidupan mereka. Maka dari itu, perlu adanya analisis terhadap tindakan konkret Pemerintah Kalurahan dalam menanggapi kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat (pengrajin) akan memberikan wawasan mendalam tentang efektivitas upaya perlindungan di tingkat lokal.

Dengan melihat secara rinci bagaimana Pemerintah Kalurahan mengalokasikan sumber daya dan mengimplementasikan kebijakan yang berfokus pada keamanan, dan kesejahteraan masyarakat, kita dapat mengevaluasi sejauh mana upaya tersebut berhasil menjaga kesejahteraan dan keamanan warga. Selain itu, kita juga perlu mempertimbangkan responsivitas pemerintah Kalurahan terhadap perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dapat mempengaruhi tingkat perlindungan yang diberikan kepada warga. Untuk menelaah lebih jauh terkait Perlindungan Pemerintah Kalurahan terhadap pengrajin, berikut ini saya akan menyajikan hasil wawancara mendalam dengan Samsuri selaku Lurah Nglipar, beliau mengatakan bahwa :

”Untuk perlindungan terhadap pengrajin itu sendiri, kami selaku pemerintah Kalurahan untuk sementara ini belum ada keterlibatan secara langsung di karenakan sekarang ini Pemerintah Kalurahan lebih memfokuskan pada pembangunan secara fisik di Kalurahan Nglipar tetapi dalam perlindungan warga secara umum seperti penanggulangan bencana, terdapat dua kelompok tangguh bencana yang telah dibentuk oleh Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi. Mereka dikenal sebagai Jaga Warga dan memiliki fungsi yang sangat penting dalam menanggulangi berbagai bencana yang terjadi di masyarakat, baik melalui personel maupun kelompok.

Masyarakat Kalurahan Nglipar rata-rata adalah petani. Pada tahun ini, terjadi kegagalan panen di kalurahan Nglipar akibat cuaca ekstrem yang mengganggu musim tanam. Pemerintah kalurahan telah menyiapkan anggaran tanggap bencana untuk menghadapi situasi tersebut yang berupa bibit tanaman yang cocok untuk ditanam pada musim kemarau. Selain itu, untuk memastikan keamanan masyarakat, setiap RT juga dilengkapi dengan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) dan Siskamling, yang bertugas menjaga ketertiban serta melindungi warga dari berbagai ancaman seperti pencurian dan tawuran". (wawancara, 28 Maret 2024)

Dari pernyataan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa dalam konteks bencana kegagalan panen di Kalurahan Nglipar akibat cuaca ekstrem, Pemerintah setempat telah mengambil langkah dengan menyediakan anggaran tanggap bencana. Langkah ini mencakup penyiapan bibit tanaman yang cocok untuk ditanam pada musim kemarau seperti bibit jagung. Untuk pembagian bibit jagung dilakukan secara merata dan dari pengakuan salah satu masyarakat di Kalurahan Nglipar pembagian bibit jagung ini baru pertama kali ada di bulan Mei dan untuk bibit-bibit yang lain seperti yang disebutkan oleh pak Lurah itu belum ada tindakan lanjutan. Ini menunjukkan upaya yang dilakukan untuk membantu masyarakat menghadapi dampak dari bencana alam.

Selain itu, terkait perlindungan pengrajin memang benar adanya bahwa keterlibatan dari Pemerintah Kalurahan sampai saat ini belum ada. Dari pengamatan peneliti juga setuju dengan pernyataan di atas dikarenakan infrastruktur jalan di Kalurahan Nglipar sangat minim karena ada sebagian jalan menuju beberapa tempat salah satunya yaitu Padukuhan Kedungranti. Yang dimana jalan tersebut mengalami kerusakan sehingga fokus

Pemerintah Kalurahan lebih pada bidang pembangunan secara fisik. Tetapi dalam perlindungan pengrajin, seharusnya Pemerintah Kalurahan terlibat langsung karena tupoksi dari Pemerintah Kalurahan itu sendiri adalah melayani dan melindungi masyarakatnya, termasuk para pengrajin yang berkontribusi signifikan terhadap perekonomian lokal.

Nah untuk menelaah lebih lanjut terkait perlindungan Pemerintah Kalurahan terhadap pengrajin, akan disampaikan oleh Agung Murdiyanto selaku carik, beliau mengatakan bahwa :

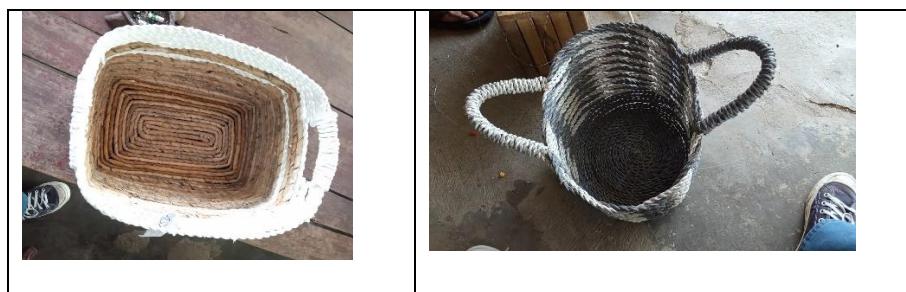
“Sebagai carik, saya dapat mengonfirmasi bahwa saat ini di Kalurahan Nglipar belum ada bentuk perlindungan yang spesifik untuk para pengrajin dari pihak Pemerintah Kalurahan. Hal ini tentu menjadi perhatian kami karena pengrajin merupakan salah satu elemen penting dalam perekonomian lokal, namun hingga saat ini, kami masih dalam tahap merencanakan program yang tepat.”.
(wawancara, 25 April 2024)

Dalam pernyataan di atas, terlihat bahwa carik Kalurahan Nglipar secara eksplisit mengonfirmasi bahwa saat ini belum ada bentuk perlindungan spesifik yang diberikan kepada para pengrajin oleh Pemerintah Kalurahan. Pernyataan ini menunjukkan adanya kekosongan dalam kebijakan yang seharusnya memberikan dukungan dan keamanan bagi para pengrajin. Ketiadaan perlindungan ini dapat mencakup berbagai aspek, seperti perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual, dukungan finansial, jaminan sosial, hingga keamanan kerja. dari pendapat carik yang mengatakan bahwa hingga saat ini, pihak Kalurahan masih dalam tahap merencanakan program yang tepat.

Dari analisis peneliti, pernyataan di atas menandakan bahwa selama ini kinerja Pemerintah Kalurahan kurang dalam melihat kondisi masyarakat karena dari informasi yang peneliti dapatkan bahwa pengrajin ini sudah ada sejak tahun 2018 sehingga hal ini seharusnya sudah di ketahui oleh Pemerintah Kalurahan dan memberikan perlindungan atau undang-undang perlindungan terhadap pengrajin. Dari jawaban di atas terlihat bahwa sampai saat ini Pemerintah Kalurahan belum mengeluarkan program atau masih dalam tahap perencanaan, hal ini menandakan bahwa selama ini Pemerintah Kalurahan belum menjalankan tupoksinya masing-masing.

Di bawah ini salah satu contoh hasil kerajinan tangan yang di buat oleh pengrajin dan telah di pasarkan di negara tetangga.

Gambar 2. 4 Produk Kerajinan Tangan



Sumber : Peneliti Tahun 2024

Dari kedua gambar diatas merupakan hasil produk kerajinan tangan para pengrajin yang di buat sedemikian rupa dalam kurun waktu 3 sampai 4 jam. Gambar pertama merupakan rexta mini, ukuran M dengan harga per satuannya Rp. 6.000 dan kegunaannya untuk menyimpan pakaian kotor para tamu di setiap kamar hotel/apartemen. Untuk gambar kedua merupakan keranjang laundry, ukuran L dengan harga per satuannya Rp. 8.000.

Selanjutnya peneliti meminta pendapat dari ibu Fatimah selaku masyarakat pengrajin Kalurahan Nglipar tentang perlindungan Pemerintah Kalurahan terhadap pengrajin beliau mengatakan bahwa :

“Kalau menurut saya perlindungan di Nglipar ini kurang karena banyak masalah yang ada terjadi pada kami tetapi kalau tentang keuangan mereka tahu semua. Salah satunya itu, kami disini ada banyak pengrajin yang mempunyai skill tapi sayang sekali skill kami ini tidak dimanfaatkan oleh Pemerintah Kalurahan. Bahkan sampai saat ini, Pemerintah Kalurahan tetap menutup mata dengan adanya pengrajin disini. Untuk melihat kami saja tidak pernah, bagaimana mereka mau pedulikan kami”. (wawancara, 05 April 2024)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pengrajin di Kalurahan Nglipar merasa kurang mendapatkan perlindungan dan perhatian dari pemerintah kalurahan serta pengrajin merasa Pemerintah Kalurahan tidak berada di tengah-tegah mereka. Beberapa masalah yang dihadapi oleh pengrajin belum ditangani dengan baik, menciptakan kesenjangan antara kebutuhan pengrajin dan respons pemerintah. Ini bisa mencakup aspek-aspek seperti keamanan kerja, perlindungan hak kekayaan intelektual, akses ke pasar, dan dukungan finansial. Meskipun Pemerintah Kalurahan dikatakan memahami dan mengetahui masalah keuangan, pengrajin merasa bahwa perhatian tersebut tidak diterjemahkan ke dalam tindakan nyata yang mendukung mereka. Ini mencerminkan ketidaksesuaian dalam prioritas pemerintah, di mana masalah keuangan mungkin lebih diutamakan dibandingkan dengan pengembangan dan perlindungan pengrajin.

Pengrajin di Nglipar memiliki keterampilan (skill) yang tidak dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah kalurahan. Padahal,

pemanfaatan keterampilan pengrajin dapat memberikan dampak positif signifikan, seperti peningkatan produksi lokal, peningkatan pendapatan masyarakat, dan pelestarian budaya lokal. Kurangnya inisiatif dari pemerintah untuk memanfaatkan keterampilan ini menunjukkan kurangnya visi dalam memberdayakan potensi lokal. Keluhan pengrajin tentang pemerintah kalurahan yang 'menutup mata' dan tidak pernah mengunjungi mereka menunjukkan tidak adanya pengakuan dan perhatian dari pemerintah terhadap keberadaan dan kontribusi pengrajin. Hal ini dapat menyebabkan demotivasi di kalangan pengrajin dan menghambat perkembangan mereka. Pengrajin merasa diabaikan dan tidak diakui sebagai bagian penting dari komunitas.

Tidak adanya interaksi langsung antara pemerintah kalurahan dan pengrajin menunjukkan kesenjangan komunikasi yang serius. Ini bisa menghambat aliran informasi dan masukan dari pengrajin ke pemerintah, sehingga kebijakan yang dibuat tidak mencerminkan kebutuhan dan aspirasi pengrajin. Interaksi yang lebih sering dan terbuka antara kedua pihak sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat efektif dan bermanfaat.

dari pendapat peneliti dengan melihat kesenjangan antara kebutuhan pengrajian dan respon pemerintah harusnya Pemerintah Kalurahan perlu lebih sering berinteraksi dengan pengrajin untuk memahami kebutuhan mereka dan mengidentifikasi masalah yang dihadapi. Program-program yang memanfaatkan keterampilan pengrajin harus diinisiasi untuk

meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka. Mengembangkan kebijakan perlindungan yang mencakup aspek hukum, finansial, dan akses pasar bagi pengrajin. Memberikan pengakuan resmi dan penghargaan kepada pengrajin yang berprestasi untuk memotivasi dan menghargai kontribusi mereka. Menyediakan program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pengrajin dalam aspek-aspek seperti manajemen usaha, pemasaran, dan inovasi produk.

Di bawah ini merupakan salah satu contoh langkah-langkah atau cara pembuatan kerajinan tangan oleh pengrajin di Kalurahan Nglipar.

Gambar 2. 5 Cara Pembuatan Kerajinan Tangan



Sumber : Peneliti Tahun 2024

Pada gambar pertama merupakan dokumentasi alat dan bahan yang digunakan untuk membuat kerajinan tangan yaitu gunting, tali nilon, pelepas pisang yang telah kering dan dibentuk serta alat cetak. Pada gambar kedua, dokumentasi langkah pertama untuk membuat kerajinan yaitu memasang tali nilon pada alat cetak untuk mendapatkan hasil sesuai dengan bentuk yang di inginkan.

Untuk memastikan lebih jauh tentang perlindungan Pemerintah Kalurahan terhadap pengrajin peneliti meminta pendapat dari Suwardi selaku Ketua BUMKal, beliau mengatakan bahwa :

“Tanggapan saya positif karena termasuk pemberdayaan masyarakat, meskipun peran pengrajin hanya sebagai plasma, bukan inti. Penghasilan mereka sekitar Rp. 70.000 per hari untuk mengerjakan satu tas yang dihargai Rp. 1.000. Meskipun pengrajin di desa saya hanya mendapat Rp. 100 per tas, pekerjaan ini tetap dianggap positif karena memberi kesibukan. Saya belum pernah mempraktikkannya, tapi pengrajin bekerja selama 8 jam sehari. Upah tergantung pada jumlah pesanan dan jenis produk, seperti tas kertas atau amplop. Namun, masalahnya adalah banyak produk yang menumpuk karena pesanan tidak dibayar, sehingga masyarakat dirugikan. Sebagai ketua BUMKal, saya merasa tidak berdaya. Di Indonesia, plastik sangat murah dan sulit dihilangkan, sementara di luar negeri lebih banyak menggunakan tas dari bahan yang ramah lingkungan”.
(wawancara, 05 April 2024)

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti melihat bahwa ketua BUMKal melihat dari beberapa sisi terkait dengan kerajinan tangan yang ada di Kalurahan Nglipar. Terkait pemberdayaan masyarakat beliau menyambut baik upaya pemberdayaan masyarakat, meskipun menyadari bahwa peran pengrajin dalam hal ini lebih sebagai pelengkap daripada inti dari program tersebut. Hal ini menunjukkan pemahaman akan pentingnya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi.

Pandangan peneliti terkait respon Ketua BUMKal menunjukkan bahwa tanggapan tersebut sangat tidak relevan dengan tugas dan tanggung jawab yang seharusnya dilakukan. Hal ini mencerminkan bahwa BUMKal belum mampu melihat dan mengangkat potensi yang ada di masyarakat

secara efektif. BUMKal seharusnya berperan aktif dalam mendukung dan memberdayakan pengrajin lokal untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian Kalurahan.

Kemudian melalui wawancara dengan Marsudi selaku sekretaris BPKal beliau menyatakan bahwa :

“Sejauh ini, di Kalurahan Nglipar, kami belum memiliki program khusus atau kebijakan yang memberikan perlindungan bagi para pengrajin. Meskipun kami menyadari pentingnya perlindungan tersebut untuk mendukung dan memajukan para pengrajin lokal, kami belum mendapatkan alokasi anggaran atau panduan dari pemerintah terkait hal ini”. (wawancara, 02 Mei 2024)

Pernyataan ini menegaskan bahwa di Kalurahan Nglipar saat ini belum ada program khusus atau kebijakan yang dirancang untuk memberikan perlindungan bagi para pengrajin. Ketiadaan ini menunjukkan bahwa sektor pengrajin belum menjadi prioritas dalam perencanaan kebijakan lokal. Perlindungan bagi pengrajin bisa mencakup berbagai aspek seperti jaminan sosial, dukungan finansial, dan perlindungan hak kekayaan intelektual, yang kesemuanya belum tersedia di Kalurahan ini. Meskipun tidak ada program atau kebijakan yang ada, pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kalurahan menyadari pentingnya perlindungan bagi pengrajin. Ini mengindikasikan adanya pemahaman tentang peran strategis pengrajin dalam perekonomian lokal dan pentingnya dukungan yang diperlukan untuk memastikan mereka dapat beroperasi secara berkelanjutan dan berkembang.

Menurut saya sebagai peneliti Ketiadaan program perlindungan ini memiliki beberapa implikasi negatif terhadap pengrajin di Kalurahan Nglipar dimana Tanpa perlindungan, pengrajin mungkin menghadapi risiko lebih besar terkait keamanan kerja dan kondisi kerja yang tidak memadai. Kurangnya akses ke dukungan finansial dapat menghambat pengrajin dalam mengembangkan usahanya atau berinovasi dalam produk. Tanpa program yang mendukung pemasaran dan distribusi produk kerajinan, pengrajin mungkin kesulitan untuk menjangkau pasar yang lebih luas. oleh karena itu Pemerintah Kalurahan harus lebih proaktif dalam mengadvokasi kebutuhan pengrajin kepada pemerintah pusat dan provinsi. Kolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat dan sektor swasta juga bisa membantu dalam mendapatkan dukungan tambahan.

Dari keseluruhan uraian wawancara di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa terlihat jelas bahwa Pemerintah Kalurahan Nglipar belum memberikan perlindungan yang memadai bagi pengrajin. Hal ini dikonfirmasi oleh berbagai pihak, termasuk Lurah Nglipar, Carik, dan masyarakat pengrajin sendiri. Pemerintah Kalurahan Nglipar saat ini lebih memfokuskan pada pembangunan fisik, seperti perbaikan infrastruktur jalan, dan penanggulangan bencana. Fokus ini, meskipun penting, menyebabkan pengabaian terhadap sektor pengrajin yang juga membutuhkan perhatian dan dukungan. Tidak ada kebijakan atau program khusus yang dirancang untuk melindungi dan mendukung pengrajin. Ketiadaan ini mencakup berbagai aspek, seperti perlindungan terhadap hak

kekayaan intelektual, dukungan finansial, jaminan sosial, dan keamanan kerja. Pengrajin yang memiliki keterampilan tinggi merasa bahwa kemampuan mereka tidak dimanfaatkan dengan baik oleh Pemerintah Kalurahan. Pemerintah Kalurahan menghadapi tantangan signifikan dalam perencanaan dan implementasi program perlindungan bagi pengrajin. Tantangan ini terutama mencakup keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Meskipun ada kesadaran akan pentingnya perlindungan pengrajin, keterbatasan ini menghambat kemampuan pemerintah untuk mengambil tindakan konkret.

Selain itu juga, jika di korelasikan dengan Misi dari Pemerintah Kalurahan Ngliar pada point kesembilan dan seterusnya bahwa ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan public yang ramah, cepat, tepat serta meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD). Dari sini kita tahu bahwa alur kerja dari Pemerintah Kalurahan sudah ditentukan tetapi pada pelaksanaannya belum ada hingga sekarang terutama pada pengrajin yang ada di Kalurahan Nglipar.

B. Dampak Perlindungan Pemerintah Kalurahan terhadap Pengrajin

Tindakan pemerintah desa dalam menjaga keamanan dan ketertiban memiliki dampak langsung terhadap tingkat kepercayaan dan kenyamanan warga dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dengan adanya keamanan yang terjamin, warga akan merasa lebih aman dan nyaman dalam melakukan aktivitas mereka, baik itu di rumah, tempat kerja, maupun di tempat umum. Ini akan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup

secara keseluruhan di Kalurahan Nglipar. Tindakan Pemerintah Kalurahan dalam mendorong pembangunan ekonomi lokal dapat membuka peluang baru bagi masyarakat Kalurahan Nglipar untuk meningkatkan pendapatan dan memperbaiki taraf hidup mereka. Melalui program-program seperti pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, dan promosi produk lokal, pemerintah Kalurahan dapat meningkatkan daya saing ekonomi Kalurahan dan mengurangi tingkat kemiskinan.

Secara keseluruhan, perbuatan Pemerintah Desa dalam melindungi warga memiliki dampak yang sangat penting dan luas, tidak hanya terhadap kondisi saat ini, tetapi juga terhadap masa depan pembangunan dan kesejahteraan desa tersebut. Oleh karena itu, penting bagi Pemerintah Desa untuk terus melakukan upaya-upaya yang berkelanjutan dalam melindungi dan meningkatkan kesejahteraan warga mereka. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Dampak Perlindungan Pemerintah Kalurahan terhadap pengrajin, berikut ini dijelaskan oleh Pak Samsuri selaku Lurah :

”kalau menurut saya, masyarakat di Kalurahan Nglipar sampai saat ini aman-aman saja karena belum pernah ada yang datang mengeluh ke saya. Selain dari itu juga, pada saat masyarakat di Kalurahan Nglipar mengalami panen yang kurang baik karena cuaca seperti di tahun ini kami selaku Pemerintah Kalurahan telah menyiapkan bantuan untuk mereka yaitu kami memberikan benih jagung,padi,kacang tanah, kedelai dan pupuk juga. Saya pikir dengan begini masyarakat merasa terbantu”. (wawancara, 28 Maret 2024)

Dari pernyataan diatas, mencerminkan pandangan subjektif dari Pak Lurah tentang kondisi keamanan dan upaya bantuan yang dilakukan kepada masyarakat di Kalurahan Nglipar. Pernyataan "aman-aman saja

karena belum pernah ada yang datang mengeluh ke saya" menunjukkan bahwa pandangan tersebut didasarkan pada pengalaman pribadi Pak Lurah. Namun, keamanan masyarakat tidak dapat hanya dinilai dari kurangnya keluhan yang dilaporkan. Ada kemungkinan bahwa masalah keamanan atau kesejahteraan masyarakat tidak terungkap karena berbagai faktor seperti ketakutan, kurangnya kesadaran, atau ketidakmampuan untuk melaporkan. Pak Lurah tampaknya mengukur tingkat keamanan berdasarkan jumlah keluhan yang diterima. Pendekatan ini bisa menjadi tidak akurat karena masyarakat mungkin tidak melaporkan masalah yang mereka hadapi karena berbagai alasan. Oleh karena itu, evaluasi yang lebih holistik diperlukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat tentang keamanan masyarakat.

Selain itu, langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah setempat untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan dalam panen menunjukkan tanggung jawab sosial yang baik. Memberikan bantuan berupa benih dan pupuk adalah langkah positif untuk meningkatkan produksi pertanian dan membantu masyarakat menghadapi tantangan ekonomi. Melalui pemberian bantuan dalam bentuk benih, pupuk, dan tanaman pangan lainnya, pemerintah setempat mengadopsi pendekatan proaktif untuk membantu masyarakat menghadapi masalah pertanian. Ini menunjukkan kesadaran akan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat lokal dan keinginan untuk memberikan solusi yang berkelanjutan. Dalam keseluruhan, wawancara ini mencerminkan upaya pemerintah setempat

untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dalam menghadapi tantangan pertanian, meskipun pandangan tentang tingkat keamanan mungkin terlalu bersifat subjektif dan dapat ditingkatkan dengan melibatkan pendekatan yang lebih holistik. Lebih lanjut dijelaskan oleh Wasto selaku ketua BPKal menyatakan bahwa :

“Sampai sekarang terbukti kalau masyarakat disini aman-aman saja, kalaupun ada itu biasanya bencana alam yang tidak terduga seperti musim kemarau yang berkepanjangan. Disini juga dalam pengelolaan sumber daya seperti anggaran kami mengupayakan untuk semaksimal mungkin sesuai dengan kebutuhan, istilah orang jawa itu asal jalan saja. Terkadang juga dampak program yang kita buat itu tidak terlihat nyata karena masyarakat disini kurang merespon dan kepedulian mereka terhadap wilayah mereka itu sendiri kurang”. (wawancara, 05 April 2024)

Istilah "asal jalan saja" dalam pernyataan tersebut mencerminkan bahwa Pemerintah Kalurahan tidak mempunyai inovatif dan gagasan serta Pemerintah Kalurahan menjadi Pemerintah yang sangat tradisional sehingga mereka menjadi kaku dan menerima apa adanya seperti berserah pada takdir. Seharusnya mereka memanfaatkan peluang yang ada karena banyak masyarakat pengrajin yang ada di Kalurahan Nglipar. Sebuah pendekatan yang lebih berfokus pada menjalankan program dan pengelolaan anggaran secara pragmatis dan berkelanjutan, namun seringkali tanpa adanya perencanaan, pengawasan, dan evaluasi yang mendetail. Akibatnya, meskipun program-program tersebut tetap berjalan, dampaknya tidak selalu terlihat nyata atau dirasakan oleh masyarakat karena mungkin tidak terarah dan kurang mendapatkan respon serta partisipasi aktif dari

masyarakat itu sendiri. Pendekatan ini dapat berpotensi menghambat efektivitas upaya pemerintah dalam melindungi dan memberdayakan masyarakat secara optimal. Selanjutnya Agung Murdiyanto selaku carik menyatakan bahwa :

"disini untuk kejadian pada sektor keamanan dan ekonomi itu aman-aman saja, anggap saja bahwa tidak ada kejadian yang merugikan masyarakat karena mereka terlindungi"

(wawancara, 05 April 2024)

Pernyataan tersebut menyiratkan bahwa menurut narasumber, situasi keamanan di Kalurahan Nglipar dianggap stabil dan aman. Hal ini peneliti sudah membuktikan sendiri bahwa warga di Kalurahan Nglipar merasa aman karena berdasarkan hasil wawancara masyarakat mengakui bahwa belum ada kejadian yang mengancam kehidupan mereka. Tetapi pada sektor Ekonomi masyarakat mengakui bahwa Pemerintah Kalurahan kurang memperhatikan masyarakat terutama pada masyarakat pengrajin yang ada di Kalurahan Nglipar.

Menurut Peneliti, Pemerintah Kalurahan hanya menyimpulkan masyarakat aman karena belum ada keluhan yang masuk tetapi sebenarnya masyarakat khususnya pengrajin merasa bahwa tidak dilindungi karena dari tahun 2018 sampai 2024 belum ada program atau undang-undang yang keluar tentang pengrajin itu sendiri. Hal ini menandakan bahwa kinerja Pemerintah Kalurahan dalam melayani dan melindungi itu sangat kurang.

Selanjutnya akan disampaikan oleh ibu Muryani selaku masyarakat (pengrajin) :

"kalau untuk ekonomi kami disini ya pas-pas an aja mbak, kalau panen kurang bagus ya kami hanya berharap sama kerajinan yang ada disini soalnya itu membantu juga buat saya walaupun seminggu menghasilkan Rp.50.000 – Rp. 100.000, sangat disayangkan sekali pemerintah Kalurahan kurang memperhatikan kami. Malahan kami tidak pernah di kunjungi mbak, yang datang mengunjungi kami malah pemerintah yang dari Jogja karena mereka tau disini ada kerajinan tangan". (wawancara, 05 April 2024)

Ketiadaan perlindungan spesifik bagi pengrajin menunjukkan adanya kekosongan kebijakan yang dapat menyebabkan pengrajin merasa diabaikan dan tidak mendapat dukungan yang diperlukan. Ini dapat menghambat pertumbuhan dan kesejahteraan ekonomi pengrajin. Pengrajin merasa diabaikan oleh pemerintah kalurahan, yang tidak memanfaatkan keterampilan mereka dan tidak memberikan dukungan yang dibutuhkan. Ini menciptakan rasa ketidakpuasan dan demotivasi di antara pengrajin, yang bisa mengurangi produktivitas dan inovasi.

Dari pandangan peneliti, point kritiknya berada pada pengrajin mengatakan bahwa tidak pernah di kunjungi dan pernah di kunjungi oleh pemerintah dari Jogja. Hal ini menandakan bahwa Pemerintah Kalurahan tidak mampu melihat potensi yang ada pada Kalurahan mereka sendiri. Pada empat kewenangan desa salah satunya yaitu pemberdayaan masyarakat desa, pada point ini Pemerintah Kalurahan belum memberdayakan masyarakat pengrajin, hal ini sangat di sayangkan sekali karena yang melakukan pemberdayaan masyarakat di Kalurahan Nglipar merupakan pengepul itu sendiri. Lalu kemanakah peran Pemerintah Kalurahan Nglipar.

Permaslahan serupa juga dirasakan oleh Suyatin selaku masyarakat (pengrajin) :

“Dulu kerajinan ini pernah didatangi langsung oleh orang dari SCTV sama Indosiar, di kalurahan saya pernah sampaikan kepada Lurah karena pernah mempunyai wacana untuk jadikan kerajinan sebagai Icon Nglipar melihat anggota pengrajin lumayan banyak. Hal ini kan bisa menguntungkan pemerintah dan punya nilai plus tersendiri bukan hanya menguntungkan kami masyarakat. Namun, dari pemerintah tidak pernah menanggapi/ merespon masukan saya ini. Terlepas dari masalah untung, ketika tahun 2018/2019 semua orang bingung mau ngapain apalagi dengan adanya covid, semua kegiatan kita terhambat. Ditahun itu, kita lagi booming-boomingnya mendapatkan untung dan sebulan kita bisa mendapatkan 4.000 pcs. Hal ini sangat membantu masyarakat apalagi di jaman covid-19 kita bingung mau melakukan apa dan ditahun itu saya membantu memberdayakan masyarakat sebanyak 200 lebih orang dengan membuat kerajinan tangan ini. Biasanya kalau masyarakat tidak ada pekerjaan di kebun mereka bisa hasilkan banyak kerajinan itu keuntungannya bisa sampai Rp.800.000 per minggu. Di Kalurahan Nglipar ini, saya melihat banyak masyarakat yang mempunyai skill, kemampuan tetapi sangat disayangkan sekali pemerintah Kalurahan tidak memperhatikan dan tidak menggubris hal ini. Di Mengger itu sendiri anggota pengrajin ada 60 orang”.
(wawancara, 05 April 2024)

Wawancara menyoroti potensi besar dari industri kerajinan tangan di Kalurahan Nglipar, dengan jumlah anggota pengrajin yang cukup banyak. Narasumber menekankan bahwa pengembangan kerajinan ini bisa menjadi ikon lokal yang menguntungkan tidak hanya masyarakat tetapi juga pemerintah, karena potensi ekonomi yang signifikan yang bisa dihasilkan. Salah satu sorotan utama dari wawancara adalah kurangnya respons

pemerintah terhadap masukan dan usulan untuk menjadikan kerajinan sebagai ikon lokal. Meskipun sudah ada wacana dan usulan, pemerintah setempat tidak memberikan tanggapan atau tindak lanjut yang jelas. Hal ini mencerminkan ketidakmampuan atau ketidakpedulian pemerintah setempat terhadap pengembangan ekonomi lokal dan pemanfaatan potensi yang ada.

Narasumber juga menggambarkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 terhadap industri kerajinan tangan. Meskipun sebelumnya industri ini sedang mengalami masa "booming" dengan hasil produksi yang tinggi dan memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi masyarakat, namun pandemi menghambat kegiatan produksi dan mengurangi pendapatan masyarakat. Narasumber juga menyoroti peran aktifnya dalam membantu pemberdayaan masyarakat melalui kerajinan tangan, dengan melibatkan lebih dari 200 orang dalam proses produksi. Hal ini menunjukkan potensi adanya solusi lokal untuk mengatasi tantangan ekonomi, dengan memanfaatkan keterampilan dan sumber daya yang ada di masyarakat.

Dari analisis data yang di dapatkan terjadi ketimpangan data antara jumlah pengrajin yang di sampaikan oleh pengepul berbeda dengan jumlah pengrajin yang di sampaikan oleh Pemerintah Kalurahan. Hal ini dikarenakan aktivitas pengrajin bersifat dinamis dengan banyak pengrajin yang tidak terdaftar secara formal tetapi tetap berkontribusi pada produksi kerajinan. Pengepul sering berhubungan langsung dengan pengrajin sehingga mereka lebih sadar akan jumlah sebenarnya yang aktif.

Di sisi lain, kurangnya koordinasi dan komunikasi yang efektif antara pengepul dan Pemerintah Kalurahan sehingga menyebabkan disparitas data. Pemerintah kalurahan tidak selalu mendapatkan laporan terbaru dari pengepul atau komunitas pengrajin, karena Pemerintah Kalurahan sering kali menutup mata terhadap keberadaan para pengrajin tersebut.

Berdasarkan pernyataan diatas, Suwardi selaku ketua BUMKal menyatakan bahwa :

“Oke, disni SDAnya banyak, tenaga pengrajin banyak tetapi tidak dimanfaatkan, nah sekarang saya mau manfaatkan bisa membuat tetapi yang mau pesan, mau pakai, mau beli siapa? Kalau saya buat itu kan menggunakan waktu, energi dan kalau tidak ada yang mau membeli kan hanya buang-buang waktu sementara itu habis pakai, termakan waktu yang kalau lama kan gapok, beda dengan plastik itu kan pesanan luar negeri, pertanyaannya mungkin knpa saya tidak mencari, memangnya mudah seperti membolak-balikkan telapak tangan ntuk mencar pesanan orang luar negeri. (wawancara, 05 April 2024)

Narasumber menyatakan bahwa meskipun ada banyak SDM dan pengrajin di wilayah Kalurahan Nglipar, potensi ini tidak dimanfaatkan secara optimal. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi yang ada dan pemanfaatannya untuk pengembangan ekonomi lokal. Pak Marsudi menggaris bawahi tantangan dalam pemasaran produk lokal. Meskipun mereka memiliki keterampilan untuk membuat produk, kesulitan muncul ketika mencari pasar atau pelanggan yang mau membeli produk tersebut. Tantangan ini meliputi aspek waktu, energi, dan ketidakpastian akan kesuksesan penjualan. Narasumber menyampaikan kesulitan dalam mencari pesanan atau pelanggan, terutama dari luar negeri. Mereka

menggambarkan proses mencari pesanan sebagai sesuatu yang sulit dan memerlukan upaya yang besar, berbeda dengan industri plastik yang mungkin memiliki pasar yang sudah ada dan permintaan yang stabil.

Tanggapan peneliti terkait pernyataan ketua BUMKal menunjukkan pandangan yang pesimis dan cenderung pasif mengenai tantangan pemasaran. Menganggap mencari pasar luar negeri sulit dan tidak mencoba mencari alternatif atau solusi kreatif menunjukkan sikap yang kurang konstruktif. Oleh karena itu, Pemerintah kalurahan harus lebih optimis dan solutif, dengan mencari berbagai jalur pemasaran, termasuk melalui pameran, kerjasama dengan lembaga eksportir, atau platform digital untuk memperluas jangkauan pasar. Selain dari itu juga, pengepul siap bekerja sama dengan pihak BUMKal untuk membantu pemasaran karena pengepul telah memiliki relasi yang luas dengan negara tetangga seperti Malaysia, Hongkong dan thailand.

Berkaitan dengan hal ini, Suyatin selaku masyarakat (pengrajin/pengepul) menyatakan bahwa :

”kalau saya mbak, ketika saya mengajak kerja sama dengan Pemerintah Kalurahan itu karena saya sudah punya relasi dan untuk mencari relasi buat pemasaran itu gampang sekali mbak. Dana untuk kerajinan tangan sebenarnya ada untuk pelatihan kepada masyarakat tetapi dari pemerintah desa tidak mau/tidak merespon tentang adanya kerajinan ini, kemungkinan besar mereka berpikir bahwa apasih keuntungan kerajinan tangan itu. Padahal ketika saya dan teman-teman menjadikan kerajinan sebagai pendapatan sampingan kami merasa bahwa keuntungan dari kerajinan ini sangat besar. Saya juga pernah memberi masukan kepada lurah untuk memberdayakan teman-teman yg disabilitas

untuk membuat kerajinan, kalau ini disetujui saya sendiri siap untuk memberikan pelatihan di Kalurahan. Selain dari itu juga saya bilang ke mereka buat kerja sama untuk mendapatkan alat dari pemerintah, hal ini kan menguntungkan buat kita. Tetapi sampai sekarang tidak ada respon apapun”. (wawancara, 05 April 2024)

Narasumber menyoroti pentingnya relasi dalam menjalin kerjasama dengan pemerintah setempat. Mereka mengindikasikan bahwa memiliki relasi yang baik dapat mempermudah akses ke peluang kerjasama dengan pemerintah, namun, hal ini mungkin tidak selalu menjadi jaminan untuk mendapatkan tanggapan atau dukungan yang diinginkan. Meskipun ada dana yang tersedia untuk pelatihan kerajinan tangan kepada masyarakat, narasumber menyatakan bahwa pemerintah setempat tidak merespons atau tidak mau untuk mendukung industri kerajinan tangan ini. Hal ini menunjukkan ketidakpahaman atau kurangnya kesadaran akan potensi ekonomi dan manfaat yang bisa diperoleh dari pengembangan industri kerajinan tangan.

Narasumber juga menyampaikan inisiatif untuk melibatkan masyarakat dengan disabilitas dalam industri kerajinan tangan, sebagai bagian dari upaya memberdayakan lebih banyak anggota masyarakat. Ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya inklusi sosial dan ekonomi dalam pengembangan industri lokal. Meskipun telah diajukan usulan untuk mendapatkan alat dari pemerintah, narasumber menyatakan bahwa tidak ada respons atau tanggapan yang diberikan. Hal ini menyoroti tantangan dalam mendapatkan dukungan praktis dari pemerintah, seperti alat dan fasilitas,

yang dapat membantu meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi dalam industri kerajinan tangan. Wawancara ini mengungkapkan ketidakpastian dan kekecewaan narasumber terhadap kurangnya respons dan tindak lanjut dari pemerintah setempat terhadap usulan dan masukan yang telah diberikan. Hal ini menunjukkan perlunya proses pengambilan keputusan yang lebih transparan dan responsif dari pemerintah dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal.

Secara keseluruhan, wawancara tersebut menyoroti tantangan dalam menjalin kerjasama dengan pemerintah setempat untuk mengembangkan industri kerajinan tangan, serta pentingnya kesadaran dan responsifitas dari pihak pemerintah terhadap potensi ekonomi lokal dan aspirasi masyarakat. Hal ini langsung ditanggapi oleh Marsudi selaku anggota BPKal menyatakan bahwa :

”Kami selaku BPKal sudah menyampaikan kepada Lurah untuk memberdayakan pengrajin yang ada di Kalurahan Nglipar, jika mereka tidak ada modal silakan bantu untuk memberikan modal, tetapi masyarakat disini kesulitan dalam pemasaran makanya kalau warga mau usaha mereka sudah takut terlebih dahulu. Hal ni yang perlu dicari jalan keluarnya. Dan sampai sekarang masukan yang kami berikan belum dijalankan”. (wawancara, 02 Mei 2024)

Dari pernyataan diatas terlihat bahwa, BPKal telah menyampaikan kepada Lurah untuk memberdayakan pengrajin lokal di Kalurahan Nglipar, termasuk dengan memberikan bantuan modal jika diperlukan. Ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya mendukung pengembangan industri lokal sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh pengrajin lokal

adalah kesulitan dalam pemasaran. Ketika masyarakat menghadapi kesulitan dalam menjual produk mereka, hal ini dapat menghambat motivasi untuk memulai usaha. Ini menunjukkan perlunya solusi untuk mengatasi masalah pemasaran dan meningkatkan akses pasar bagi produk-produk lokal.

Meskipun telah diberikan masukan dan usulan oleh BPKal, wawancara menunjukkan bahwa rekomendasi ini belum dijalankan atau diimplementasikan oleh pemerintah setempat. Ini mencerminkan kurangnya keterlibatan atau keseriusan dari pemerintah setempat dalam mengatasi masalah pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi lokal. Wawancara menyoroti perlunya mencari solusi konkret untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh pengrajin lokal, terutama terkait dengan masalah pemasaran. Ini memerlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat untuk mencari jalan keluar yang efektif dan berkelanjutan.

Tidak adanya tindak lanjut terhadap masukan yang diberikan oleh BPKal menyoroti pentingnya responsifitas dan aksi dari pemerintah setempat dalam menanggapi masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari sekadar memberikan rekomendasi, perlu adanya tindakan konkret untuk mengatasi masalah yang ada. Secara keseluruhan, wawancara tersebut menggambarkan tantangan yang dihadapi dalam upaya pemberdayaan pengrajin lokal dan perlunya

responsifitas serta tindakan konkret dari pemerintah setempat dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

Dari keseluruhan hasil wawancara diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tindakan pemerintah desa dalam menjaga keamanan dan ketertiban memiliki dampak signifikan terhadap tingkat kepercayaan dan kenyamanan warga. Hal ini berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Upaya pemerintah desa dalam mendorong pembangunan ekonomi lokal menjadi kunci untuk meningkatkan pendapatan dan memperbaiki taraf hidup masyarakat. Namun, masih terdapat tantangan dalam hal pemasaran produk lokal dan pemberdayaan pengrajin.

Meskipun terdapat usulan dan masukan dari berbagai pihak, respons dan tindak lanjut dari pemerintah desa terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat masih kurang memadai. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan responsifitas dan aksi konkret dari pemerintah dalam mengatasi tantangan pembangunan. Terdapat potensi besar dalam pengembangan industri kerajinan tangan lokal, namun masih terdapat kesenjangan dalam pemanfaatan potensi tersebut. Perlu adanya strategi dan dukungan yang lebih baik untuk mengoptimalkan potensi ekonomi lokal. Masyarakat menunjukkan kesadaran dan inisiatif dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal, namun memerlukan dukungan lebih lanjut dari pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan ekonomi lokal memerlukan kolaborasi antara

pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat untuk mencari solusi konkret yang efektif dan berkelanjutan.

Selain itu, jika di lihat dari konsep *governing* Pemerintah Desa merupakan suatu konsep yang membahas tentang bagaimana mengacu pada keputusan yang dibuat oleh pemerintah Kalurahan dalam upaya mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat. *Governing* mengandung sebuah proses politik, hukum, dan administrasi. Sebab politik merupakan sebuah kegiatan dan keputusan hukum, sedangkan adminitrasi merupakan bentuk teknis eksekusi dari hukum atau keputusan. *Governing* berarti mengatur dan mengurus ekonomi, sosial, politik, dan lain-lain yang dilakukan pemerintah. Fungsi pemerintah utamanya sebagai *protecting* atau melindungi bukan sekedar promoting. *Protecting* yang memiliki arti pemerintah harus bisa melindungi rakyatnya dari rampasan elite ekonomi dan menyelesaikan sengketa. *Governing* mengacu pada keputusan yang dibuat pemerintah dalam upaya mengatur serta mengurus kepentingan masyarakatnya setempat. *Governing* merupakan sebuah kontestasi agar tetap lurus diperlukan pemerintah yang kuat, berdaulat dan demokratis serta tidak diintervensi oleh elite, dan pihak lainnya. Kalurahan sebagai kesatuan masyarakat hukum atau badan hukum publik memiliki kewenangan meskipun belum seluas kewenangan pemerintah daerah.

Konsep *Governing* sangat tepat untuk melihat pengaplikasian kebijakan yang dilaksanakan pemerintahan Kalurahan Nglipar dalam upaya melindungi warga karena rumusan *Governing* mengacu pada keputusan

yang dibuat oleh pemerintah Kalurahan Nglipar kepada masyarakat untuk terus melindungi warga dalam permasalahan yang ada. Perlindungan bagi setiap warga negara merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu negara. Begitu juga negara Indonesia yang wajib melindungi setiap warga negaranya dimanapun berada.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah melalui serangkaian analisis mendalam, dapat disimpulkan beberapa poin penting yang menjadi temuan utama dari penelitian ini mengenai *Governing* Pemerintah Desa dalam melindungi pengrajin di Kalurahan Nglipar, Kapanewon Nglipar, Daerah Istimewa Yogyakarta :

1. Perlindungan terhadap pengrajin di Kalurahan Nglipar hingga saat ini belum optimal karena keterbatasan sumber daya manusia di Pemerintahan Kalurahan yang belum mampu mengelola potensi yang ada secara efektif. Keterbatasan ini mengakibatkan kurangnya program dan inisiatif yang dapat mendukung dan mengembangkan keterampilan serta pemasaran produk-produk pengrajin lokal, sehingga mereka kesulitan untuk bersaing di pasar yang lebih luas.
2. Kurangnya perlindungan dari Pemerintah Kalurahan Nglipar telah mengakibatkan pemberdayaan pengrajin dilakukan oleh pengepul, bukan oleh pemerintah setempat. Akibatnya, pengrajin seringkali bergantung pada pengepul untuk mendapatkan dukungan dan akses pasar, yang dapat menyebabkan ketergantungan yang tidak sehat dan kurangnya kemandirian ekonomi bagi para pengrajin.

B. Saran

1. Pemerintah desa harus menggunakan kekuasaan mereka untuk menolong warga dengan cara mengkaryakan BUMDes agar memberikan wadah

kepada pengrajin sehingga mereka mampu bertumbuh dan harus ada regulasi yang mampu melindungi kelompok pengrajin

2. Membentuk dan mengembangkan program pemberdayaan pengrajin yang terstruktur dan berkelanjutan, yang meliputi pelatihan keterampilan, dukungan teknis, akses permodalan, serta pemasaran produk. Program ini harus didukung oleh kebijakan yang jelas dan komitmen kuat dari pemerintah kalurahan untuk memastikan keberlanjutannya. Dengan adanya program yang fokus pada pemberdayaan, pengrajin dapat mengembangkan kemandirian ekonomi dan memaksimalkan potensi kerajinan lokal, sehingga kesejahteraan masyarakat setempat dapat meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, alinea ke- IV.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang *Ketenagakerjaan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang *Desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.

JURNAL

Fitriani, Rini. (2016). Peranan Penyelenggaraan perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak. *Jurnal Hukum*.

(<https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/42>) Diakses pada 31 Juli 2024)

Horukie, Alfian. (2015). Peranan Pemerintah Desa Memberi Perlindungan Hak Milik Atas Tanah Masyarakat di Desa Ponto Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Ilmu Politik*.

(<https://www.neliti.com/id/publications/1072/peranan-pemerintah-desa-memberi-perlindungan-hak-milik-atas-tanah-masyarakat-di>) Diakses pada Tanggal 31 Januari 2024

Putra, Setia. (2014). Perlindungan Hukum konsumen dalam Transaksi jual-beli e-Commerce. *Jurnal ilmu hukum.*

(<file:///C:/Users/ASUS/Downloads/2794-5537-1-SM.pdf>) Diakses pada 31 Juli 2024

Regita, F. A., Prathama, Ananta. (2023). Peran Pemerintah Desa Dalam Upaya Pencegahan dan Penurunan Stunting terintegrasi. *Jurnal Ilmu Admnisitrasi.* (<https://doi.org/10.35724/sjias.v12i1.4704>) Diakses pada 31 Januari 2024

Sood, Mohammad. Lalu Putrawandi., dan Khairur Rizki. (2021). Upaya Pencegahan Peredaran narkoba Dalam Rangka Melindungi Masyarakat Di Kabupaten Lombok Tengah Nusa tengga Barat. *Jurnal Wartal Desa.* ([10.29303/jwd.v3i2.129](https://doi.org/10.29303/jwd.v3i2.129)) Diakses pada 16 Januari 2024

BUKU

Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik.* PT Rineka Cipta. Yogyakarta.

Bogdan, Taylor. 2012. *Prosedur Penelitian.* Dalam Moleong, *Pendekatan Kualitatif.* Rineka Cipta. Yogyakarta.

Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan, Publik Dan Ilmu Sosial Lainnya.* Putra Grafika. Jakarta.

Eko Sutoro, (2015), *Regulasi Baru, Desa Baru ide, misi, dan semangat uu desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.*

Herdiana, Dian. 2019. Peran Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat. *Jurnal JUMPA*. Vol. 6 No. 1

Husaini, Usman. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bumi Aksara. Jakarta.

J. Moleong, Lexy. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. PT Remaja Rosdakarya , Bandung.

Komariah, A., Satori, D. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung.

Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Cetakan Keenam. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006;

Sugiman. (2018). Pemerintahan Desa. *Jurnal Binamulia Hukum*.7(1): 82-95.

Wardiyanta. 2006. *Metode Penelitian Pariwisata*. ANDI. Yogyakarta.

LAMPIRAN

BUKTI DOKUMENTASI SETELAH WAWANCARA INFORMAN

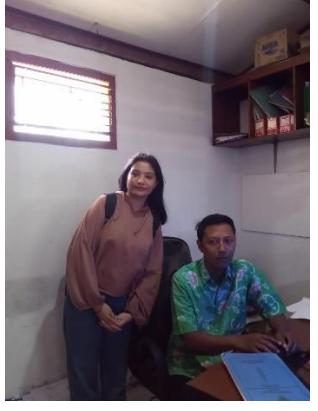
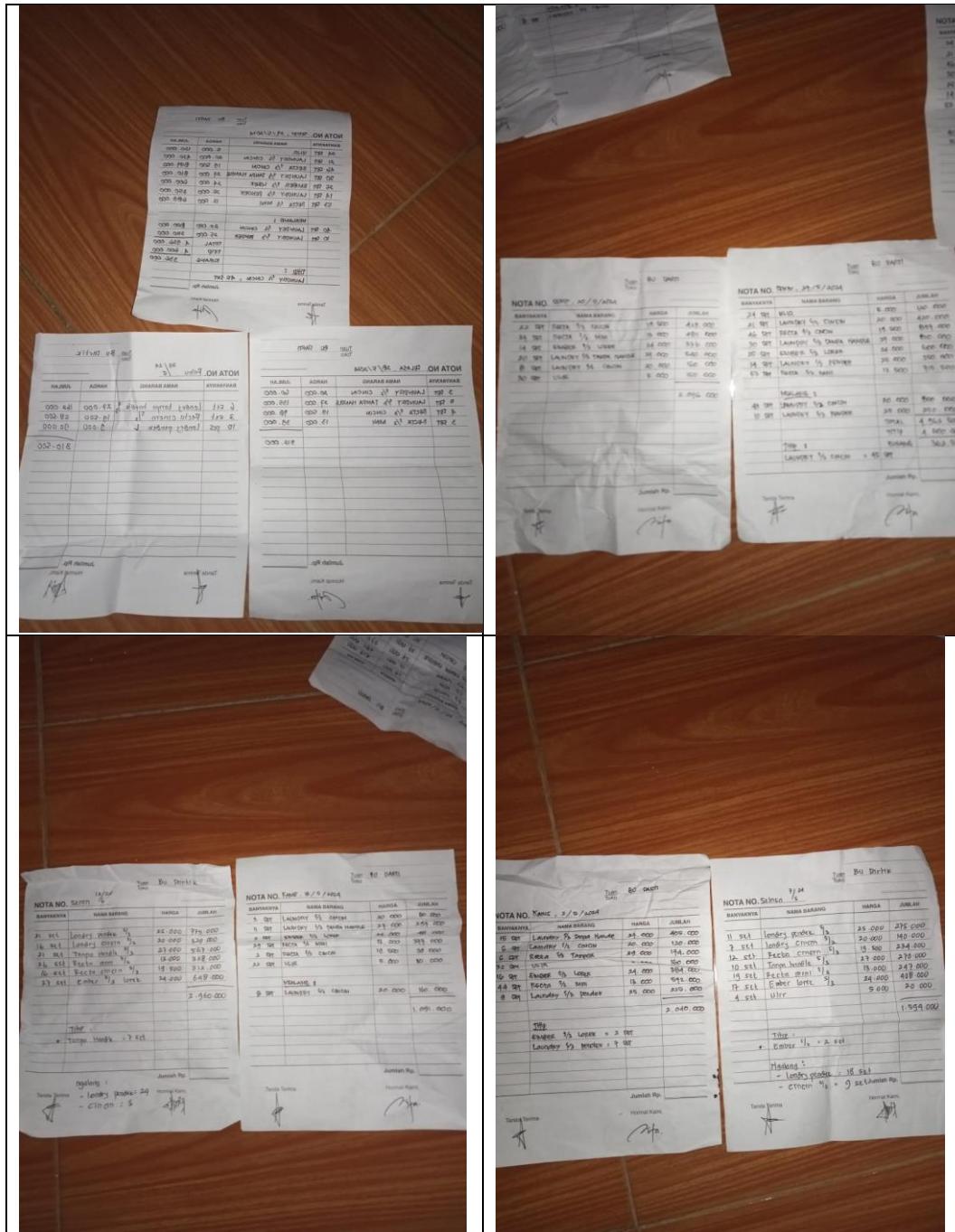
	
Foto bersama Pak Samsuri S.pd, Lurah Nglipar	foto bersama pak Agung Murdiyanto, carik Nglipar
	
Foto bersama pak Wasto, Ketua BPKal	foto bersama pak Marsudi S.Sos, Anggota BPKal

	
Foto bersama pak Suwardi M.Pd, ketua BUMKal	Foto bersama pak Sukiyo, anggota BUMKal
	
Foto bersama ibu Siti Fatimah, masyarakat (pengrajin)	Foto bersama ibu Ngatini, masyarakat (pengrajin)

	
Foto bersama ibu Nuning, masyarakat (pengrajin)	Foto bersama ibu Muryani, masyarakat (pengrajin)
	
Foto bersama pak Suyatin, masyarakat (pengrajin)	

DOKUMENTASI TRANSAKSI ANTAR PENGEPUL DAN PENGRAJIN



SURAT PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI



SURAT PERMOHONAN IJIN PENELITIAN



YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD" YOGYAKARTA

Akreditasi Institusi B

• PRODI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM DIPLOMA TIGA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI A
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER, STATUS TERAKREDITASI RAII SE KALI

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id, e-mail : info@apmd.ac.id

Nomor : 279/I/U/2024

Hal : Permohonan ijin penelitian

Kepada Yth :

Lurah Nglipar, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul

Di Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa Mahasiswa Program Sarjana (S1) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta yang namanya tersebut dibawah ini akan mengadakan penelitian lapangan dalam waktu 1 bulan. Penelitian tersebut oleh Mahasiswa yang bersangkutan digunakan dalam rangka penyusunan Skripsi yang hasilnya akan diperhitungkan untuk penelitian dalam kemampuan Studi di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".

Adapun nama Mahasiswa dan judul Penelitian adalah :

Nama : Roswita Gabriela Rambu Wada

No Mhs : 20520060

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Judul Skripsi : Governing Pemerintah Desa dalam Melindungi Warga di Kalurahan Nglipar, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul

Tempat : Kalurahan Nglipar, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul

Dosen Pembimbing : Analius Giawa, S.P., M.Si

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mengharapkan kesediaan Bapak/ Ibu untuk berkenan memberikan izin serta bantuan fasilitas seperlunya guna memungkinkan dan memudahkan pelaksanaan penelitian tersebut.

Atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu, kami ucapan terima kasih.

Yogyakarta, 21 Maret 2024
Ketua
17
YOGYAKARTA
Dr. Sutoro Eko Yunanto
NIY. 170 230 190

SURAT TUGAS



YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD" YOGYAKARTA Akreditasi Institusi B

• PRODI PENGEMBANGAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM DIPLOMA TIGA, STATUS TERAKREDITASI B
• PRODI STUDI PEMERINTAHAN SOSIAL, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B
• PRODI STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B
• PRODI STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER, STATUS TERAKREDITASI BAIK SAKU

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id, e-mail : info@apmd.ac.id

SURAT TUGAS Nomor : 127/I/T/2024

Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta memberikan tugas kepada:

Nama : Roswita Gabriela Rambu Wada
Nomor Mahasiswa : 20520060
Program Studi : Ilmu Pemerintahan.
Jenjang : Sarjana (S-1).
Keperluan : Melaksanakan Penelitian.
a. Tempat : Kalurahan Nglipar, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul
b. Sasaran : Governing Pemerintah Desa dalam Melindungi Warga di Kalurahan Nglipar, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul
c. Waktu : 1 Bulan

Mohon yang bersangkutan diberikan bantuan seperlunya.



PERHATIAN :

Setelah selesai melaksanakan penelitian, mohon surat tugas ini diserahkan kepada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

MENGETAHUI :

Kepala Desa/Kepala Kelurahan/Pejabat Instansi tempat penelitian bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian.

PEDOMAN WAWANCARA

Governing Pemerintah Desa Dalam Melindungi Pengrajin Di Kalurahan Nglipar,
Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul

Identitas Informan

Nama : ...

Umur : ...

Jenis Kelamin : ...

Pendidikan : ...

Pekerjaan : ...

A. Perlindungan Pemerintah Kalurahan terhadap Pengrajin

1. Apa saja langkah konkret yang telah diambil oleh pemerintah desa dalam upaya melindungi warga dari ancaman keamanan, baik dari aspek fisik maupun non-fisik?
2. Apakah terdapat kebijakan spesifik yang telah diterapkan oleh pemerintah desa untuk memperkuat sistem keamanan dan pengawasan di wilayah mereka? Jika ada, bagaimana efektivitasnya dinilai oleh masyarakat setempat?
3. Apakah pemerintah desa memiliki program pelatihan atau penyuluhan secara rutin untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keamanan dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk melindungi diri mereka sendiri?

4. Bagaimana pemerintah desa mengelola sumber daya untuk mendukung upaya perlindungan warga, termasuk alokasi anggaran, personel, dan peralatan?
5. Bagaimana evaluasi kinerja dilakukan terhadap kebijakan dan program yang telah diimplementasikan oleh pemerintah desa dalam hal melindungi warga, dan apakah ada upaya untuk melakukan perbaikan berkelanjutan?

B. Dampak perlindungan Pemerintah Kalurahan terhadap Pengrajin

1. Bagaimana dampak perbuatan pemerintah desa dalam melindungi warga terhadap aspek sosial dan ekonomi masyarakat, seperti peningkatan rasa aman, stabilitas ekonomi, dan kohesi sosial?
2. Apakah terdapat dampak tak terduga dari kebijakan atau program perlindungan yang diterapkan oleh pemerintah desa, baik positif maupun negatif, yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut?
3. Bagaimana pemerintah desa mengelola sumber daya yang tersedia, seperti anggaran dan personel, untuk memaksimalkan dampak perlindungan terhadap warga?
4. Apa dampak program pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat lokal ?
5. Apakah terdapat program pembangunan ekonomi lokal yang dijalankan oleh pemerintah desa untuk melindungi warga dari kemiskinan dan menghasilkan kesempatan kerja?